



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kontijensi perlu dilakukan guna menanggulangi darurat bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa rencana kontijensi merupakan dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan upaya penanggulangan Bencana yang cepat dan efektif di Kabupaten Karawang;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman penyusunan rencana kontinjensi bencana di Kabupaten Karawang perlu pengaturan mengenai rencana kontinjensi bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

5. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial serta tanggapan dan pengeralahan potensi yang telah disetujui bersama.
6. Perencanaan Kontinjensi Bencana adalah rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko.
7. Rencana Kontinjensi Bencana adalah rencana kontinjensi yang digunakan dalam keadaan bencana atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi bencana.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.
9. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan abrasi pantai.
10. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan Bencana dengan upaya pengurangan resiko Bencana secara terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana bertujuan sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat Bencana dalam melakukan penanggulangan Bencana yang cepat dan efektif di Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 3

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum;
 - c. pengembangan skenario;
 - d. kebijakan dan strategi;
 - e. perencanaan sektoral;
 - f. pemantauan dan rencana tindak lanjut;
 - g. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana disusun melalui kajian yang dilaksanakan setelah terjadi Bencana.
- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila tidak terjadi Bencana selama dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku, dapat dilakukan peninjauan ulang terhadap dokumen Rencana Kontinjensi Bencana.
- (4) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat Bencana.

Pasal 5

Rencana Kontinjensi Bencana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dimuat dalam bentuk website dan media lainnya pada perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Oktober 2016**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Oktober 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 32 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI
NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 31 TAHUN 2016
TANGGAL 28 OKTOBER 2016
TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, berada dibagian Utara Provinsi Jawa Barat, yang secara geografis terletak antara $107^{\circ}02'$ - $107^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}56'$ - $6^{\circ}34'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.753,27 Km² atau 3,73 persen dari luas Provinsi Jawa Barat.

Sebelah Utara Wilayah Kabupaten Karawang terbentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang $\pm 84,23$ Km yang menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Karawang, sementara sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Bentuk tanah di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rata antara 0- 5 meter diatas permukaan laut. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0 – 1.200 meter diatas permukaan laut. Dan sesuai dengan bentuk morfologinya Kabupaten Karawang terdiri dari dataran rendah yang mempunyai temperatur udara rata-rata 27 derajat Celsius dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66 persen dan kelembaban nisbi 80 persen, curah hujan tahunan berkisar antara 1.100 – 3.200 mm/tahun.

Kabupaten Karawang dilalui aliran sungai yang melandai ke Utara arah sungai Citarum dan merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang, serta sungai Cibeet yang merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Selain itu secara geologis sebagian besar wilayah Kabupaten Karawang tertutup dataran pantai yang luas terhampar di bagian Utara dan merupakan batuan sendimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas, terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Dibagian tengah ditempati oleh perbukitan, terutama dibentuk oleh endapan sendimen, sedangkan dibagian Selatan terletak gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 meter diatas permukaan laut.

Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografis, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan sangat beragam menurut bulan. Catatan rata-rata curah hujan di Kabupaten Karawang selama tahun 2014 mencapai 2.046 mm dengan rata-rata hari hujan 100 hh. Pada tahun 2013 rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu rata-rata mencapai 758 mm dan yang terendah terjadi pada bulan Oktober, yaitu secara rata-rata hanya 5 mm.

Berdasarkan kondisi yang digambarkan diatas, Kabupaten Karawang merupakan daerah dataran rendah dan merupakan dataran aluvial yang materi tanahnya merupakan endapan hasil pengangkutan aliran permukaan dan air sungai yang mengalir pada daerah tersebut, dan hal ini menjadikan wilayah Kabupaten Karawang rawan banjir, baik berupa banjir kiriman maupun akibat curah hujan yang tinggi, juga menjadikan daerah ini menjadi rawan tanah longsor, kekeringan dan abrasi pantai.

Berdasarkan Indek Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2013, salah satu ancaman bencana yang dihadapi Warga Masyarakat Kabupaten Karawang adalah 1. Banjir (Ranking 1 Total Skor 36 Kelas Resiko Tinggi), 2. Abrasi Pantai (Ranking 16 Total Skor 36 Kelas Resiko Tinggi), 3. Kekeringan (Ranking 108 Total Skor 24 Kelas resiko Tinggi), dan 4. Kebakaran Hutan (Ranking 140 Total Skor 36 Kelas Resiko Tinggi), dan 5. Tanah Longsor (Ranking 303 Total Skor 12 Kelas Resiko Tinggi) Dari catatan kejadian banjir yang pernah terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan terakhir Tahun 2016. Pada tahun 2013 bencana banjir meliputi di 28 kecamatan atau 93,33 persen wilayah kecamatan di Kabupaten Karawang, 162 desa atau 52,94 persen, jumlah rumah tergenang 59.049 rumah dengan jumlah jiwa terendam 231.959 jiwa. Pada tahun 2014 daerah genangan meliputi 26 kecamatan atau 86,67 persen, desa tergenang 192 desa atau 62,14 persen, jumlah rumah terendam 48.437 rumah, dengan jumlah jiwa mencapai 415.769 jiwa. Dan dampak banjir yang disertai curah hujan yang tinggi adalah tanah longsor yang meliputi 6 kecamatan, 12 desa, jumlah rumah rusak 37 rumah dengan jumlah jiwa 156 jiwa.

Kejadian bencana lainnya adalah abrasi pantai dengan wilayah terparah di Kabupaten Karawang adalah Kecamatan Cibuaya dimana terjadi 26 kali kejadian, dengan desa yang dilanda desa Cemarajaya, 34 rumah hilang dan 121 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Pada tahun 2015 terjadi 4 kali kejadian banjir di Kabupaten Karawang, yang menggenangi 5 kecamatan, 7 desa dengan jumlah rumah tergenang 3.031 rumah dengan jumlah jiwa menderita 10.303 jiwa. Dan kejadian tanah longsor yang melanda 1 desa, jumlah rumah yang roboh/hancur 1 rumah dengan jumlah jiwa 3 jiwa. Bencana lainnya adalah kebakaran hutan yang meliputi 1 kecamatan dan 4 desa dengan lokasi 1 Gunung Kaum Luwuk Desa Kutamaneuh luas lahan terbakar $\pm$ 35 Ha, 2. Gunung Cengkik Desa Cintalanggeng luas lahan terbakar $\pm$ 30 Ha, 3. Gunung Ciodeng Desa Cintawargi dengan luas lahan terbakar 20 Ha dan 4 Gunung Cipaga Desa Wargasetra dengan luas lahan terbakar $\pm$ 95 Ha.

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan upaya dengan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Salah satunya Perencanaan Kontijensi Bencana Tingkat Kabupaten Karawang. Perencanaan Kontijensi Bencana sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan. Rencana ini diharapkan dapat menjadi Pedoman pada saat menghadapi darurat bencana bagi semua pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Karawang, sehingga semua sumber daya yang ada dapat termobilisasi dan terkordinasi dengan baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang

terkena dampak bencana. Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat.

B. Pengertian Rencana Kontinjensi

1. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
2. Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
6. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
7. Perencanaan kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
8. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontingensi.
9. Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.
10. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
11. Sektor adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. klaster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.

12. Perencanaan Sektoral adalah suatu rencana yang disusun oleh klaster yang berisikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di masing-masing klaster untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.
13. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.
14. Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
15. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
16. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu system penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
17. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat.
18. Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.
19. Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiap siagaan terpadu.
20. Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana kontingensi menjadi legal secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah.

C. Tujuan

Dokumen rencana kontijensi ini bertujuan untuk memberikan landasan operasional, strategi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi; sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana dapat terpenuhi dengan baik.

D. Sifat Rencana Kontijensi

Dokumen rencana kontijensi ini bersifat :

1. Partisipatif, disusun oleh multi sektor dan multi pihak,
2. Dinamis dan selalu terbarukan.

E. Ruang Lingkup

Dokumen rencana kontijensi bencana ini merupakan dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang memuat kebijakan, strategi, manajemen, koordinasi dan perencanaan sektoral dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana dalam lingkup cakupan di wilayah Kabupaten Karawang yang terdiri dari 30 kecamatan, 297 Desa dan 12 kelurahan.

F. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan data dan Informasi bencana Indonesia;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 71 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

G. Proses Penyusunan Rencana Kontinjensi

Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

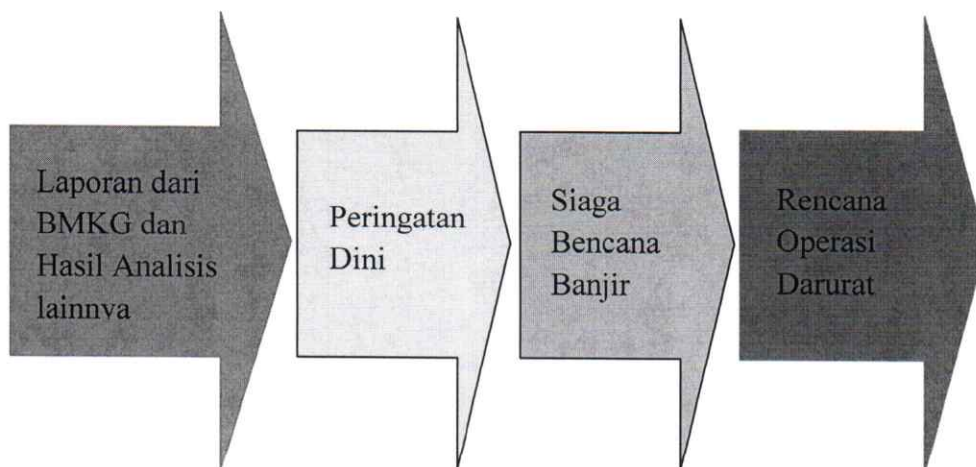
1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontinjensi.
2. Pengumpulan data dan pembaruan : Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data : Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan rancangan awal rencana kontinjensi : Penyusunan naskah akademis, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontinjensi yang disepakati.
5. *Public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontinjensi : Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontinjensi kepada pelaku penanggulangan bencana (*multi stake holder*).

H. Aktivasi Rencana Kontinjensi

Aktivasi rencana kontinjensi ini dilakukan beberapa saat sebelum terjadi bencana (siaga darurat) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kondisi curah hujan tinggi dan terus menerus dengan intensitas 100-200mm/hari baik di hulu maupun di wilayah Kabupaten Karawang dari BMKG berdasarkan pantauan cuaca.
- 2) Kenaikan Tinggi Muka Air (TMA) dikeluarkan oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II, meliputi Bendung Ir H. Juanda, Syphon Cibeet, Bendung Barugbug.
- 3) Adanya pernyataan status siaga 1 di Bendung Ir H. Juanda Kabupaten Purwakarta, dan 3 (tiga) titik pantau Tinggi Muka Air (TMA) lainnya yaitu, TMA Bendung Barugbug, TMA Syphon Cibeet dan TMA Citarum Posko Kedunggede berdasarkan pengamatan ketinggian muka air yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II.

Selanjutnya BPBD akan mempersiapkan peringatan dini kepada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk bersiaga menghadapi bencana banjir. Berdasarkan peringatan dini tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan Siaga Darurat bencana banjir dan menyatakan aktivasi Rencana Kontinjensi. Dengan prakiraan dari BMKG tersebut maka BPBD meningkatkan status siaga darurat bencana untuk melakukan rencana operasi darurat bencana, dengan asumsi masa tanggap darurat berlangsung selama 14 hari terhitung sejak ditetapkannya keadaan darurat



Gambar 1. Alur aktivasi kontinjensi banjir hingga rencana operasi.

Curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Karawang bagian Selatan mendorong terjadinya pergerakan tanah / tanah longsor, aktivasi yang dilaksanakan dilakukan sesuai dengan aktivasi rencana kontinjensi banjir, mengingat kejadian pergerakan tanah atau tanah longsor diawali dengan adanya curah hujan yang tinggi, dengan mekanisme Aktivasi Rencana Kontinjensi sebagai berikut :

- a. Jika indikator potensi bencana telah aktif/terjadi/terpenuhi, maka sistem peringatan dini banjir secara intensif memberikan informasi awal tentang akan terjadinya banjir dan kemungkinan lokasi yang akan tergenang.
- b. Setelah potensi bencana diaktifkan, Kepala Pelaksana BPBD segera melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat OPD dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana (TNI, Kepolisian, BASARNAS, BMKG, PMI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha, dll). Materi rapat antara lain membahas :
 - 1) Pembaharuan data sumber daya (manusia dan peralatan) yang secara riil dapat digerakkan dalam proses tanggap darurat.
 - 2) Menyepakati Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD) yang akan digunakan dan dilengkapi dengan pembagian tugas yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur tetap dalam lampiran rencana kontinjensi.
 - 3) Melaporkan kepada Bupati Karawang tentang status tanggap darurat aktif.

Rapat Koordinasi aktivasi Rencana Kontinjensi akan menghasilkan Rencana Operasi, yang antara lain berupa :

- a. Aktivasi Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) dan pembagian peran;
- b. Pembaharuan data sektoral;
- c. Profil dasar wilayah terpapar bencana, berdasarkan hasil kaji cepat TRC.

Pelaksanaan Rencana Operasi dapat dilakukan setelah Bupati mengumumkan Status Tanggap Darurat dan masa berlakunya tanggap darurat. (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala bencana yang terjadi).

Untuk mengetahui kondisi Kabupaten Karawang, baik pada saat sebelum terjadi, saat terjadi (tanggap darurat) maupun setelah terjadi bencana dapat dilihat melalui situs/web bpbdkrw.co.id

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan, dengan luas wilayah 1.753,27 Km² atau 3,73 persen dari luas Provinsi Jawa Barat.

Kondisi saat Kabupaten Karawang memiliki :

- a. 30 (tigapuluh) kecamatan,
- b. 297 desa, dan
- c. 12 kelurahan.

Kabupaten Karawang sebagian besar wilayah berbentuk dataran yang relatif rata antara 0-5 meter diatas permukaan laut. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0 – 1.200 meter diatas permukaan laut. Sebelah Utara Wilayah Kabupaten Karawang terbentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang $\pm 84,23$ Km yang menjadi tempat bermuaranya sungai sungai yang ada di wilayah Kabupaten Karawang.

Batas batas wilayah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Subang,
- b. Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta,
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, dan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Tarum Tengah dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk air baku untuk air minum, pengairan sawah, tambak dan keperluan Industri. Fungsi utama dari jaringan sungai dan saluran irigasi tersebut adalah sebagai sarana drainase.

Secara geologis sebagian besar wilayah Kabupaten Karawang tertutup dataran pantai yang luas terhampar di bagian Utara dan merupakan batuan sendimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas, terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Dibagian tengah ditempati oleh perbukitan, terutama dibentuk oleh endapan sendimen, sedangkan dibagian Selatan terletak gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 meter diatas permukaan laut.

Di wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Karawang juga terdapat pantai yang melintang dari timur ke barat dengan ketinggian pantai berkisar antara 0 - 5 m dari muka air laut, dan sebagian besar merupakan pantai berlumpur. Namun kecenderungan yang terjadi selama beberapa dekade adalah garis pantai itu juga mengalami perubahan terutama oleh faktor alam, yang berupa penambahan pantai oleh sedimentasi dan Abrasi yang terjadi di beberapa lokasi.

C. Kondisi Iklim

Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara $26,8^{\circ}$ celcius sampai dengan $27,7^{\circ}$ celcius. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Karawang terdiri atas sumberdaya air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas lahan.

Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografis, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan sangat beragam menurut bulan. Catatan rata-rata curah hujan di Kabupaten Karawang selama tahun 2014 mencapai 2.046 mm dengan rata-rata hari hujan 100 hh. Pada tahun 2013 rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari,

yaitu rata-rata mencapai 758 mm dan yang terendah terjadi pada bulan Oktober, yaitu secara rata-rata hanya 5 mm.

D. Peruntukan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, 3,73 % dari luas Propinsi Jawa Barat, dengan komposisi penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Pertanian Padi Sawah 94,075 Ha,
2. Pekarangan dan Bangunan 22,609 Ha,
3. Tegal/Kebun 12,300 Ha,
4. Ladang/Huma 7,705Ha,
5. Penggembalaan Padang Rumput 10,460 Ha,
6. Hutan Rakyat,
7. Rawa,
8. Tambak 10,570 Ha,
9. Kolam/Empang 1,935 Ha,
10. Hutan Negara 10,650 Ha,
11. Perkebunan 0,793 Ha,
12. Kawasan Industri dan Zona Industri 2,459 Ha,
13. Lain-lain 1,239 Ha Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat sehingga sebagian besar lahannya dipergunakan untuk pertanian.

E. Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebesar 2.077.267 jiwa, tahun 2012 berkurang menjadi 1.948.015 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,24%. Sedangkan untuk tahun 2013, berjumlah 2.075.748 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,64%, pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 1.903.115 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,04%. Tahun 2015 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 2.059.742 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,61 %.

Untuk melihat data secara rinci dapat kami sampaikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Laju Perkembangan Penduduk Tahun 2009 s/d 2015

Tahun	Kelahiran (Pertumbuhan Alami)	Migrasi (Pendatang)	Jumlah Penduduk	LPP (%)
1	2	3	4	5
2009	54.158	3.998	2.007.701	2,90
2010	52.638	12.598	2.003.164	3,26
2011	51.256	15.985	2.077.267	3,24
2012	54.330	19.051	1.948.015	3,77
2013	60.019	15.489	2.075.748	3,64
2014	57.044	19.929	1.903.115	4,04
2015	68.514	26.466	2.059.742	4,61
Rata rata	56.581	16.216		3,47

F. Sungai

Wilayah Kabupaten Karawang di bagian Barat, merupakan hilir pertemuan sungai sungai yang merupakan daerah rawan banjir. Kondisi ini diperparah lagi dengan konstur wilayah yang cenderung datar. Dan hal inilah yang menjadikan terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Karawang.

Sungai sungai tersebut meliputi :

1. Sungai sungai lintas kabupaten meliputi :
 - a. Sungai Cibeet, batas Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, merupakan sungai yang berfungsi untuk mengairan dan suplay air baku untuk kebutuhan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan bendung Cibeet sebagai pembagi dan pengendali. Dan sungai ini bermuara di sungai Citarum.
 - b. Sungai Cipamingkis, batas Kabupaten dengan Kabupaten Bogor yang bermuara di sungai Cibeet. Setelah pertemuan sungai Cipamingkis dan sungai Cibeet dijadikan titik ukur Tinggi Muka Air (TMA) aliran sungai Cibeet yang terletak di Syphon Cibeet.
 - c. Sungai Cilamaya batas Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang, dan di bagian hulu terdapat bendung Barugbug, yang dijadikan titik ukur Tinggi Muka Air (TMA) untuk aliran sungai Cilamaya dan Kalen Bawah.

d. Sungai Citarum batas kabupaten dengan Kabupaten Bekasi. Dan merupakan muara sungai Cibeet, dimana dibagian hilir setelah pertemuan kedua sungai tersebut dijadikan titik ukur untuk Tinggi Muka Air (TMA) sungai Citarum yang terletak di Posko Citarum Kedunggede.

2. Sungai sungai dalam kabupaten meliputi :

- a. Sungai Cigentis;
- b. Sungai Citaman;
- c. Sungai Cihambulu;
- d. Sungai Cipagaduren;
- e. Sungai Cikaranggalam;
- f. Sungai Cibayat;
- g. Sungai Ciawitemen;
- h. Sungai Cijati;
- i. Sungai Cacaban;
- j. Sungai Cibarengkok; dan
- k. Sungai Cipicung.
- l. Sungai Cibulanbulan
- m. Sungai Ciwadas
- n. Sungai Kalen Bawah
- o. Sungai Cidarook
- p. Sungai Kedungasem
- q. Sungai Cilesung

Keseluruhan sungai tersebut harus dijaga keberadaan dan fungsinya sebagai sumber air baku untuk air minum, irigasi maupun sebagai bagian dari sistem drainase wilayah;

G. Profil Kebencanaan

1. Karakteristik Ancaman banjir

Hampir setiap tahunnya beberapa kecamatan di Kabupaten Karawang mengalami banjir. Banjir itu pada umumnya terjadi pada bulan Desember-Maret, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya. Beberapa banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada tahun 1910, tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014. Adapun karakteristik banjir di Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh :

a) Pengaruh Curah Hujan

Hampir setiap tahunnya beberapa bagian wilayah di Kabupaten Karawang mengalami banjir. Banjir umumnya terjadi pada bulan Desember- Maret, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya. Banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2014, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Karawang mengalami kebanjiran.

b) Perubahan Peruntukan DAS

Wilayah Kabupaten Karawang dilalui oleh 4 (empat) sungai yang cukup besar yang termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citarum, diantaranya sungai Citarum, sungai Cibeet, sungai Cilamaya dan Sungai Kalen Bawah. Ketiga keempat sungai tersebut merupakan penampungan aliran air permukaan yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Subang dan Purwakarta untuk sungai Cilamaya dan Kalem bawah yang bermuara di laut Jawa wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan. Dan penampungan aliran air dari Kabupaten Bogor dan Bekasi untuk sungai Cibeet yang bermuara di sungai Citarum di

wilayah kecamatan Telukjambe Timur serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Purwakarta untuk sungai Citarum, yang bermuara di Pesisir pantai Kecamatan Pakisjaya.

Meluasnya wilayah pemukiman di area DAS Citarum (sungai Citarum dan Cilamaya), menyebabkan tingginya aliran air permukaan yang bersumber dari limpahan curah hujan serta terkendalanya proses infiltrasi ke dalam tanah akibat terhalang perkerasan jalan dan atap bangunan. Peningkatan aliran permukaan inilah yang menyebabkan banjir dan melanda beberapa wilayah di Kabupaten Karawang dan terjadi semakin meluas.

Ditinjau dari aspek Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2013-2031 bahwa kawasan tersebut diperuntukkan menjadi kawasan perkotaan serta pusat-pusat kegiatan yang berhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan industri yang meliputi :

- 1) mengembangkan kawasan perkotaan Cikampek meliputi Kecamatan Cikampek, Kotabaru, Purwasari, dan kawasan perkotaan Karawang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Klari;
- 2) mengembangkan kecamatan Klari, Purwasari, Jatisari, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Kotabaru, Tirtamulya, Telagasari, Batujaya, Pedes, Majalaya, Cilamaya Kulon, Tegalwaru, Pangkalan, dan Lemahabang yang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan kawasan;
- 3) mengembangkan kecamatan Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, Ciampel, Cilebar, Rawamerta, Jayakarta dan Kutawaluya yang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan lingkungan;
- 4) mengembangkan pusat koleksi dan distribusi kegiatan pertanian lahan basah, perkebunan, dan hortikultura di Kecamatan Rengasdengklok dan Cilamaya Wetan; dan

- 5) mengembangkan pusat-pusat pengembangan industri di Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, dan Ciampel.

Penataan Tata Ruang tersebut tidak diikuti penataan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) zoning regulation, pengendalian perizinan, pengenaan sanksi dan sebagainya.

c) Sistem Drainase

Secara umum alur jaringan drainase di Kabupaten Karawang mengikuti ketinggian (kontur) dan mengikuti pola jaringan jalan yang ada, dimana sistem pembuangan air hujan yang masih menjadi satu Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kabupaten Karawang dengan sistem pembuangan air kotor. Sistem drainase campur ini, terlihat kurang menguntungkan untuk daerah yang landai, sehingga terjadi pengendapan dan penggenangan di dalam saluran yang menyebabkan bau dan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Pada bagian lain, kondisi jalan yang relatif tinggi terhadap permukiman penduduk menjadikan saluran jalan hanya dapat dimanfaatkan sebagai saluran penampung limpasan air hujan dari badan jalan dan sebagai saluran pembawa, sedangkan saluran pembuangan dari permukiman melalui saluran yang dibuat sendiri dan dialirkan ke saluran drainase yang ada. Dan jika terjadi musim hujan selalu terjadi banjir. Daerah-daerah tersebut meliputi Kecamatan Karawang Barat, Cikampek, Cilamaya Wetan dan Rengasdengklok.

Secara umum penyebab masalah genangan yang masih sering terjadi di Kota Makassar adalah diakibatkan antara lain meliputi :

- Kurangnya pemeliharaan (penyempitan penampang saluran atau gorong-gorong) terhadap endapan tanah/sampah;

- Hambatan hidrolis (kemiringan atau hambatan di dalam penampang saluran, banyaknya belokan, duicker terlalu rendah, dll.);
- Kurangnya berfungsinya sistem street inlet, sehingga sering terlihat genangan di atas badan jalan;
- Beban saluran terlalu besar, sehingga penampang saluran yang ada tidak muat menampung beban yang ada.

d) Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah

Genangan/Banjir yang sering melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Karawang tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang kurang perhatian menjaga saluran/drainase perimer maupun drainase sekunder. Beberapa drainase kota hampir tersumbat diakibatkan sampah yang menutup seluruh permukaan drainase dan sedimen yang dapat menghambat laju aliran air hujan. Selain itu kurangnya pengawasan pemerintah mengenai pengembang perumahan yang sengaja meninggikan pondasi kawasan namun tidak memperhatikan elevasi permukaan Rencana Kontijensi Bencana Banjir kawasan sekitarnya dan kurangnya ruang terbuka hijau sehingga potensi genangan cukup tinggi daerah ini meliputi Kecamatan Rengasdengklok, Cikampek, Karawang Barat dan Kecamatan Cilamaya Wetan.

e) Sedimentasi

Pendangkalan yang terjadi pada sungai Ciwadas, Cibulanbulan, Cibeet dan sungai Citarum yang diakibatkan dari limbah buangan industri yang sudah tidak terkontrol. Disamping menyebabkan pendangkalan juga menimbulkan pencemaran pada sumber air baku PDAM yang ada di sungai ini yang dialirkan melalui saluran irigasi. Semua ini menjadi contoh nyata dan menjadi catatan penting bahwa ruang-ruang sungai perlu dilindungi dan mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Karawang.

f) Sistem Pengendalian Banjir

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan rawan bencana banjir dilaksanakan melalui upaya penanggulangan untuk meminimalkan dampak akibat bencana yang mungkin timbul. Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari pola pengendalian pemanfaatan ruang di bagian hulu, dalam lingkup satuan wilayah sungai. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir, termasuk mekanisme perijinan pemanfaatan ruang sesuai dan mendukung upaya penerapan rencana pemanfaatan ruang, dan prosedur penanganan yang tepat.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten /kota berfungsi:

1. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
2. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

2. Kondisi Kapasitas

Kondisi Kapasitas Penanggulangan Bencana di Kabupaten Karawang :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia aparatur negara sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang dan 6 (enam) tenaga harian lepas serta 40 (empat puluh) orang Satgas PB yang merupakan relawan penanggulangan bencana yang dibina langsung oleh BPBD;
- Telah melakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam penaggulangan bencana dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
- Terlaksananya upaya peningkatan Desa Tangguh Bencana,
- Telah memiliki Stock Logistik untuk bantuan korban bencana,
- Telah memiliki Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Korban Bencana dan Keputusan Bupati Tentang Besaran Bantuan Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Karawang;
- Memiliki sarana dan prasarana walaupun belum maksimal;

Tabel 2. Ketersediaan Sumber Daya Relawan dan Perahu Karet

No	Instansi/Lembaga	Jumlah Peralatan	Jumlah Personal
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11 buah	40
2	Dinas Sosial/Tagana	17 buah	46
3	Dinas Cipta Karya	2 buah	20
4	Polres Karawang	2 buah	30
5	Palang Merah Indonesia (PMI)	3 buah	50
6	Satpol PP		3.090
7	SAR Burial		100
8	Sispamdu Zhadhoel	2 buah	70
9	Telkom Karawang	1 buah	20
10	RAPI		30
11	Scout Rescue	3 buah	25
12	PDAM		6
13	SAR Sagara	3 buah	25
14	Senkom		
	Total	44 buah	3.552

3. Tingkat Resiko Bencana

Hampir setiap tahunnya beberapa kecamatan di Kabupaten Karawang mengalami banjir. Dan pada umumnya terjadi pada bulan Desember - Maret, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya. Beberapa banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2013. Banjir yang cukup besar yang terjadi di Kabupaten Karawang beberapa tahun terakhir ini adalah tahun 2014 dimana sebagian besar wilayah Kabupaten mengalami kebanjiran.

Proses perencanaan kontinjensi hanya sesuai untuk peristiwa atau kejadian dengan tingkat besar dan parahnya dampak yang ditimbulkan, sedangkan Kejadian kejadian yang tidak terlalu parah, cukup menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan jika tidak parah sama sekali tidak perlu disusun rencana kontijensi.

Tabel 3. Penilaian Tingkat Resiko dan Dampak Bencana

D A M P A K	Tingkat Kejadian			
		Dapat diabaikan	Kecil	Parah
	Parah	Kebijakan yang ada	Tetapkan skenario	Perlu proses perencanaan
	Ringan	Tidak perlu perencanaan	Kebijakan yang ada	Tetapkan skenario
K	Hampir tidak ada	Tidak perlu perencanaan	Tidak perlu perencanaan	Kebijakan yang ada

Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang pada bulan Januari tahun 2014 bahwa kerugian bencana banjir di beberapa kecamatan diantaranya rumah terdampak sebanyak 48.457 Unit, Jumlah jiwa terdampak sebanyak 415.769 jiwa atau sebanyak 116.662 KK dan dampak kerugian lainnya serta meluasnya genangan yang mencapai 26 (duapuluh enam) kecamatan. Ini menunjukkan bahwa tingginya resiko bencana banjir di Kabupaten Karawang sehingga penilaian tingkat resiko dan dampak bencana berdampak parah dan tingkat kejadian besar.

Upaya-upaya untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis ancaman bencana banjir adalah Perencanaan Kontinjensi sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau kedaruratan, termasuk kesiapsiagaan masyarakat. Diperlukannya skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat, tindakan teknis dan manajerial, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi, atau skenario penanggulangan secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO

A. Penentuan Kejadian

Penentuan kejadian banjir bedasarkan; 1) wilayah rawan bencana, 2) Tinggi Muka Air (TMA), 3) curah hujan maksimum serta 4) faktor lainnya yang dianggap dominan. Wilayah kecamatan rawan banjir di Kabupaten Karawang meliputi 26 Kecamatan dan 185 desa.

Tabel 4. Penentuan Kajian Banjir Kabupaten Karawang

No	Parameter	Indikator	Sumber Data	Bulan Pemantauan
1	Wilayah kecamatan rawan bencana	Potensi genangan > 50 % dari jumlah desa dan kecamatan	BPBD	Desember - Januari
2	Curah hujan	> 200 mm selama beberapa waktu berturut-turun	BMKG	Desember - Januari
3	Tinggi Muka Air Aliran Sungai	1. Bendung Ir. H. Juanda 110 mdpl 2. Syphon Cibeet 17 Mdpl Siaga 1 18 mdpl Siaga 2 19 mdpl Siaga 3 3. Posko Citarum Kedunggede 11 mdpl Siaga 1 12 mdpl Siaga 2 13 mdpl Siaga 3	PJT II	Derseember, Januari dan Pebruari
4	Faktor Lain yang dianggap dominan	Munculya peristiwa anomali	BGKG dan Steakholder	Derseember, Januari dan Pebruari

B. Skenario Ancaman

Berdasarkan analisa resiko bencana di Wilayah Kabupaten Karawang dalam jangka pendek memiliki ancaman banjir. Ancaman banjir diperkirakan terjadi saat musim hujan yang berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geafisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Dramaga Bogor akan mengalami puncaknya pada Minggu Ketiga Oktober 2016 sampai dengan akhir Minggu Ketiga Pebruari 2017.

Skenario yang dikembangkan dalam Rencana Kontinjensi ini adalah kejadian banjir Tahun 2014. Asumsi skenario ini dikembangkan

berdasarkan data banjir Tahun 2014, skenario banjir pada rencana kontinjensi sebagai berikut :

1. Ancaman banjir terjadi pada awal Minggu ketiga Januari 2014;
2. Sebaran banjir akan berdampak pada 26 kecamatan, 185 Desa/Kelurahan;
3. Jumlah penduduk yang terdampak banjir : 415.769 Jiwa.
4. Jumlah pengungsi 8.024 jiwa
5. Jumlah rumah terendam 48.437 rumah, dengan kondisi rusak berat 39 rumah, dan rusak sedang 12 rumah.
6. Jumlah mesjid terendam 77 mesjid/mushola, sarana pendidikan 21 unit, raksiran kerugian Rp. 10.384.125.000,00
7. Tinggi Muka Air (TMA) pada Syphon Cibeet mencapai 17,05 mdpl (Siaga I) untuk wilayah kecamatan Telukjambe Barat dan Telukjambe Timur, dan Posko Citarum Kedunggede mencapai 8,30 mdpl (normal). Dan air terus meningkat mencapai 19,60 mdpl (Siaga 3) pada Syphon Cibeet dan 13,35 mdpl (siaga 3) pada Posko Citarum Kedunggede. Pos-pos pemantauan ketinggian air di pintu air beberapa hulu sungai lainnya (Bendung Ir. H Juanda, Bendung Walahan, Bendung Barugbug) juga diasumsikan melaporkan ketinggian muka air mengalami peningkatan.
8. Tinggi Muka Air Bendung Ir H Juanda mencapai 102,43 mdpl (Normal).
9. Curah hujan rata-rata 2.046 mm dengan rata-rata 100 mm secara umum di wilayah Kabupaten Karawang.
10. Penerbitan Surat Pernyataan Bupati Karawang Nomor 360/95/I/Dinsos PB tentang Pernyataan Siaga Darurat Bencana dari tanggal 13 Januari 2014 s.d 13 Maret 2014, dan Bupati Karawang menerbitkan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Alam Di Kabupaten Karawang Nomor 360 / 158 / DINSOS PB / 2014 tanggal 18 Januari 2014, dengan masa tanggap darurat H + 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 19 Januari s.d 1 Februari 2014.

C. Wilayah Terdampak

Banjir diperkirakan akan membawa dampak baik banjir kiriman maupun hanya genangan. Data wilayah terkena dampak seperti yang terlihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Wilayah Terkena Dampak Banjir

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Prosen*	Keterangan
1	Cilamaya Wetan	9	75,00	
2	Cilamaya Kulon	10	83,33	
3	Tempuran	14	100,00	
4	Banyusari	4	33,33	
5	Karawang Barat	8	100,00	
6	Jatisari	5	35,71	
7	Telukjambe Barat	5	50,00	
8	Telukjambe Timur	9	100,00	
9	Rengasdengklok	9	100,00	
10	Tirtamulya	5	50,00	
11	Lemahabang	4	36,36	
12	Pakisjaya	7	87,50	
13	Batujaya	10	100,00	
14	Rawamerta	11	84,62	
15	Pedes	9	75,00	
16	Cilebar	9	90,00	
17	Karawang Timur	6	75,00	
18	Cibuaya	10	90,91	
19	Tirtajaya	9	81,82	
20	Klari	3	23,08	
21	Telagasari	7	50,00	
22	Jayakarta	2	25,00	
23	Majalaya	2	28,57	
24	Cikampek	2	20,00	
25	Kutawaluya	12	100,00	
26	Purwasari	4	50,00	
	Total	185	59.87	

Sumber : Hasil Rekapitulasi Data Laporan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Tahun 2014

*) dihitung dari total desa yang ada di kecamatan yang bersangkutan

D. Aspek-Aspek Terdampak

1. Aspek Penduduk.

Akibat banjir yang terjadi menyebabkan sebagian masyarakat di wilayah terdampak menjadi korban dan pengungsi. Distribusi jumlah korban dan pengungsi untuk masing-masing wilayah ditunjukkan pada Tabel dibawah ini. Detail data penduduk di kawasan rawan bencana banjir terlampir dalam dokumen Renkon ini

Tabel 6. Perkiraan Resiko Penduduk Wilayah Terdampak

Kecamatan	Terancam		Terancam Serius	Sakit	Pengungsi*
	KK	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa
Cilamaya Wetan	9.970	27.735	-	10	50
Cilamaya Kulon	6.202	21.697	-	10	52
Tempuran	4.432	9.432	-	81	403
Banyusari	1.026	2.571	-	-	-
Karawang Barat	7.829	26.887	-	334	1.670
Jatisari	1.674	5.739	-	-	-
Telukjambe Barat	3.943	12.254	-	506	2.528
Telukjambe Timur	9.317	25.416	-	-	-
Rengasdengklok	10.824	36.811	-	-	-
Tirtamulya	334	993	-	-	-
Lemahabang	279	549	-	-	-
Pakisjaya	5.653	12.114	-	-	-
Batujaya	10.568	37.018	-	-	-
Rawamerta	1.398	4.212	-	13	63
Pedes	12.493	36.489	-	1.108	5.539
Cilebar	3.663	11.122	-	-	-
Karawang Timur	5.973	15.603	-	46	231
Cibuaya	2.582	7.967	-	51	257
Tirtajaya	7.316	22.079	-	413	2.063
Klari	8.082	25.013	-	-	-
Telagasari	1.016	2.782	-	-	-
Jayakarta	2.104	2.262	-	5	25
Majalaya	142	306	-	-	-
Cikampek	1.379	4.150	-	-	-
Kutawaluya	815	3.869	-	180	899
Purwasari	737	2.694	-	-	-
Jumlah	116.260	327.617	-	2.757	13.780

Sumber : Hasil Rekapitulasi Data Laporan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Tahun 2014

*) Jumlah Perkiraan resiko korban sakit dihitung 20 % dari jumlah pengungsi.

2. Aspek Perumahan

Akibat banjir yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan rumah tinggal penduduk di wilayah terdampak dengan perkiraan jumlah dan tingkat kerusakan ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 7. Resiko Kerusakan Rumah Pada Wilayah Terdampak

No	Kecamatan	Tingkat Kerusakan		
		Berat	Sedang	Ringan
1	Cilamaya Wetan	4	-	-
2	Cilamaya Kulon	2	-	-
3	Tempuran	8	-	-
4	Karawang Barat	6	-	-
5	Telukjambe Barat	8	-	-
6	Lemahabang	2	-	-
7	Batujaya	6	-	-
8	Pedes	3	12	-
Jumlah		39	12	-

Data untuk pemukiman yang rusak akibat banjir 2014 berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

3. Aspek Sarana Prasarana

Banjir diperkirakan juga akan merusak sarana dan prasarana yang berada di wilayah terdampak. Beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan karena tergenang atau tidak dapat digunakan karena akses jalan tertutup genangan air antara lain gedung pendidikan, sarana ibadah, tempat pertemuan masyarakat, pasar, sarana transportasi, menutup akses jalan dan lain sebagainya. Tiga tabel dibawah ini memperlihatkan besaran dampak banjir terhadap sarana prasana yang ada.

Tabel 8. Gedung Sekolah Terdampak Banjir

Kecamatan	Gedung Sekolah		
	SD	SMP	SMA/SMK
Cilamaya Kulon	8		
Telukjambe Barat	2	1	
Pakisjaya	2		
Batujaya	1		1
Tirtajaya	6	1	
Cilebar	3	2	2
Tempuran	3	1	
Cilamaya Wetan	5	3	2
Jumlah	31	8	5

Data untuk gedung sekolah terendam akibat banjir 2014 berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

Tabel 9. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Rawan Banjir

Kecamatan	Tempat Ibadah	Pasar	Pusat Kegiatan Masyarakat	Transportasi
Cilamaya Wetan	-	1	-	1
Cilamaya Kulon	5	-	-	-
Pakisjaya	20	-	-	1
Batujaya	3	-	-	1
Tirtajaya	47	-	-	-
Kutawaluya	2	-	-	-
Jumlah	77	1	-	3

Data untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum terendam akibat banjir 2014 berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

Tabel 10. Lokasi Jalan Yang Tergenang Air

Kecamatan	Sebaran Lokasi Banjir	Jumlah Lokasi Banjir
Karawang Barat	Jl. A. Yani arah Tanjungpura, Jl Kertabumi, Jl. Tuparev, Jl. Ceremai Karang Indah, Jl. Prokamasi	5
Cikampek	Jl. Depan Mall Cikampek	1
Cilamaya Wetan	Jl. Kecepat Desa Mekarmulya, Jl. Pangkalan Desa Cilamaya, Jl. Desa Muara, Jl. Assydiqiyah Desa Sukatani, Jl. Satar Desa Muara Baru	5
Telukjambe Barat	Jl. Desa Karangligas, Jl. Desa Mekarmulya, Jl. Desa Parungsari, Jl. Desa Mulyajaya dan Jl. Desa Wanajaya	5
Cilebar	Jl. Desa Cikande, Jl. SMPN Cilebar, Jl. Dusun Cimunculak, Jl. Dusun Cibadar 02, Jl. Dusun Ciguha/Mekarjati, Jl. Subad	6
Tempuran	Jl. Turi-Kedungwowo, Jl. Tempuran-Ciketeng-Wadas, Jl. Pangaritan-Ciguha, Jl. Sudah	4
Pakisjaya	Jl. Dusun Tenjojaya, Jl. Dusun Tanjungjaya, Jl. Dusun Balongjaya	3

Data untuk lokasi jalan yang tergenang air akibat banjir 2014 berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang dan Laporan Camat.

4. Aspek Pemerintahan

Dampak bencana diperkirakan dapat berpengaruh terhadap fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karawang. Kejadian bencana ini diperkirakan bangunan pemerintahan seperti kantor Kecamatan, kantor desa/kelurahan, terendam atau terputus aksesnya dikarenakan banjir. Beberapa mungkin mengalami rusak ringan hingga berat. Pada tabel berikut terpapar data kantor-kantor pemerintahan yang rawan banjir.

Tabel 11. Kantor Pemerintahan Rawan Banjir

Kecamatan	Kantor Camat	Kantor Desa/Lurah
Cilamaya Wetan	1	4
Cibuaya	1	2
Karawang Barat	1	2
Telukjambe Barat	1	3
Batujaya	1	6
Cilebar		1
Tempuran		1

Data untuk pemerintahan rawan banjir 2014 berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang

5. Aspek Fasilitas Kesehatan

Dampak banjir juga akan berdampak merendam beberapa fasilitas kesehatan serta akses ke fasilitas kesehatan yang berada di beberapa wilayah seperti rumah sakit dan puskesmas maupun pusat layanan kesehatan lainnya.

Tabel 12. Fasilitas Kesehatan Rawan banjir

Nama Fasilitas Kesehatan	Kecamatan	Tinggi Air
Puskesmas Curug	Klari	200 Cm
Puskesmas Cibuaya	Cibuaya	30 Cm
Puskemas Cibuaya	Cibuaya	30 Cm
Puskemas Tanjungpura	Karawang Barat	20 Cm
Puskesmas Cilamaya	Cilamaya Wetan	50 Cm
Puskemas Batujaya	Batujaya	100 Cm

Data untuk fasilitas kesehatan rawan banjir 2014 berdasarkan Update Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rencana kontijensi banjir, Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil beberapa kebijakan dan strategi yang akan menjadi landasan operasional untuk kegiatan tanggap darurat jika terjadi banjir. Kebijakan, strategi dan detail operasional ini diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan tanggap darurat bencana banjir yang efektif dan efisien serta terkoordinasi dengan baik yang dilaksanakan secara terpadu antar unit kerja (SKPD) beserta masyarakat dan lembaga usaha. Kebijakan dan kesepakatan serta komitmen bersama merupakan perwujudan dari pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karawang. Adapun bentuk kebijakan dan strategi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan

1. Mengarahkan segala sumber daya yang ada di Kabupaten Karawang;
2. Menetapkan masa siaga darurat selama 90 hari dan masa tanggap darurat selama 14 hari;
3. Masa Tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
4. Melaksanakan tanggap darurat banjir secara terkoordinasi, terpadu dengan melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terkena bencana (terutama pengungsi) berdasarkan standar minimal bantuan sesuai peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan;
6. Memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi para korban bencana;
7. Masyarakat korban bencana yang termasuk kelompok rentan mendapatkan prioritas pelayanan;
8. Penyelenggaraan tanggap darurat bencana banjir dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

9. Menjaga berfungsinya objek vital/fasilitas umum;
10. Tetap menjamin keamanan dan ketertiban di daerah bencana dan sekitarnya;
11. Tetap menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
12. Apabila intensitas bencana banjir semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Karawang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah lainnya.

B. Strategi

Untuk mewujudkan tercapainya kebijakan-kebijakan di atas maka ditetapkan strategi-strategi dibawah ini :

1. Melakukan pengamatan dan kaji cepat pada lokasi bencana untuk mengetahui dampak bencana dan kebutuhan di lokasi bencana, sesaat setelah kejadian.
2. Mendirikan Posko Utama Penanggulangan Bencana banjir di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, dan mendirikan Posko Bantuan di tingkat Kecamatan sesuai kebutuhan;
3. Memusatkan satuan khusus penanggulangan bencana di setiap SKPD pemilik kewenangan (Dinas Cipta Karya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Satpol PP) dan ditempatkan pada lokasi yang mudah menjangkau lokasi bencana;
4. Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi (SAR) secara cepat bagi penduduk yang membutuhkan dengan Melibatkan TNI (Kodim 0604 Karawang, Polres Karawang, Arhanud 305 Karawang dan SAR dalam proses penyelamatan dan perlindungan pada saat tanggap darurat, Melibatkan peran masyarakat dalam hal tanggap darurat serta menetapkan lokasi pengungsian, berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan/desa dan mengevakuasi korban secara cepat ke lokasi pengungsian.

5. Mengelola penampungan sementara atau pengungsian, dan menyelenggarakan dapur umum, penyediaan air bersih dan sanitasi umum;
6. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis bagi pengungsi secara optimal, pelayanan psikososial dasar, dan pendidikan anak pada masa darurat;
7. Menyediakan kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar minimal bantuan;
8. Memerintahkan kepada seluruh Instansi pelayanan publik untuk memberikan;
9. pelayanan secara maksimal dan jika dibutuhkan selama 24 jam setiap hari selama masa tanggap darurat;
10. Mengamankan aset masyarakat yang terkena dampak (aset yang dibawa maupun yang ditinggal mengungsi);
11. Memfungsikan kantor – kantor pelayanan baik di tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten. Jika kantor terdampak bencana maka fungsinya dapat dialihkan ke lokasi yang bebas banjir dan bisa diakses;
12. Memprioritaskan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat yang rentan seperti Lansia, anak-anak, ibu hamil, orang sakit dan difable (orang-orang dengan kemampuan berbeda);
13. Menyediakan data informasi pengelolaan bantuan secara transparan;
14. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan tanggap darurat yang sudah dilaksanakan dan menyusun laporan pertanggung jawaban.
15. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan hingga tingkat kelurahan, masyarakat, lembaga usaha, media massa dan pemangku kepentingan dan mengaktifkan sistem koordinasi kedaruratan.

BAB V

PERENCANAAN SEKTORAL

Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam melindungi segenap masyarakat dari bencana banjir dan menata kembali kehidupan setelah bencana. Untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi tersebut maka perlu ditetapkan perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral ini merupakan wujud operasionalisasi fungsi-fungsi manajerial dalam pencapaian kebijakan dan strategi. Berdasarkan skenario kejadian dan skenario dampak banjir, pengalaman dalam merespon bencana banjir di Kabupaten Karawang selama ini, serta mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat maka bidang/sektor yang perlu ditetapkan sebagai berikut :

1. Bidang Pos Komando Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops)
2. Bidang Perencanaan
3. Bidang Logistik dan Peralatan
4. Bidang Operasi sektor SAR dan Keamanan
5. Bidang Operasi sektor Kesehatan
6. Bidang Operasi sektor Sarana dan Prasarana

A. Sektor Pos Komando Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops)

Bidang atau sektor Pusdalops berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan tanggap darurat bagi sektor-sektor yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lapangan. Sektor ini dibawah komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Bupati Karawang sebagai pimpinan tertinggi. Komandan pengendali operasi akan dibantu oleh beberapa unit dalam melaksanakan tugasnya, antara lain unit personalia, unit perencanaan, unit logistik, unit keuangan, unit data informasi dan Humas. Sektor ini bertugas untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sektor-sektor terpenuhi untuk memperlancar kegiatan tanggap darurat di lapangan.

Adapun struktur komando pengendali operasi terdiri atas :

- 1. Komandan Tanggap Darurat Bencana;
- 2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana;
- 3. Staf Komando terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Hubungan Masyarakat;
 - c. Keselamatan dan Keamanan;
 - d. Perwakilan instansi/lembaga.
- 4. Staf Umum terdiri atas :
 - a. Bidang Operasi;
 - b. Bidang Perencanaan;
 - c. Bidang Logistik dan Peralatan;
 - d. Bidang Administrasi Keuangan

Struktur organisasi ini merupakan organisasi standar dan dapat diperluas berdasarkan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana serta dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Pelibat Sektor

No	Lembaga	Nama Kontak	Kontak	Peran
1	Sekretariat	Sekretaris Daerah	08111998277	Mengkoordinasi seluruh SKPD dan para pihak terkait dan Mengkoordinasi Pengerahan sumber daya dari para pihak
2	BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	0821 2711 2009	Mengkoordinasi dan menghimpun rencana masing-masing bidang

3	KODIM	Dandim 0604	081288414400	Menyediakan rencana kamtib bagi petugas dan masya rakat, korban, dan pengungsi serta menyiapkan rencana koordinasi antar satuan di TNI
4	Polres Polsek	Polres Polsek Krw Kota Polsek Klari Polsek Tlj Barat Polsek Tjl Timur Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya	0267 402240 0267 402516 0267 431032 - 0267 642222 0267 4675445 0264 316110 0264 8386699 0264 360110 0264 340988 0267 510110 0267 7002110 026 7482110 0267 7006579 0267 470220 0267 7002024 0267 4639044 0267 7004504 0267861 6946 0267 8617856 0267 5165251	Menyediakan rencana kamtib bagi petugas dan Masya rakat, korban, dan pengungsi serta menyiapkan rencana koordinasi antar satuan di satuan di POLRI
5	BMKG	Kepala BMKG	08121416323	Melakukan pemantauan dan analisis kecenderungan perubahan kondisi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. Analisa, evaluasi dan distribusi informasi peringatan dini
6	PJT II	Direktur PJT II		Melakukan pemantauan Tinggi Muka Air dibeberapa sungai besar

7	Dishub Kominfo	Kepala Dishub Kominfo	085714555886	Penyebarluasan informasi (berbagai media) Merencanakan “call center” di salah satu posko yang cukup aman, representatif, dengan fasilitas dan sarana yang cukup
8	Bagian Humas	Kabag Humas	085693318287	Penyebarluasan informasi (berbagai media)
9	Telkom	Dir. Telkom		Merencanakan “call center” di salah satu posko yang cukup aman, representatif, dengan fasilitas dan sarana yang cukup
10	Satpol PP	Ka Satpol PP		Merencanakan jaminan keamanan dan ketertiban bagi infrastruktur penting seperti kantor pemerintah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum
11	RAPI	Ka RAPI	081380299002	Merencanakan atau mendesain informasi dari lokasi bencana ke Posko Bencana

2. Situasi

Bencana Banjir memungkinkan menimbulkan gangguan atau bahkan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu perlu upaya untuk menghadapi bencana banjir di Kabupaten Karawang secara efektif, efisien dan terpadu. Untuk mewujudkan penanggulangan bencana khususnya kegiatan tanggap darurat secara efektif, efisien dan terpadu diperlukan langkah-langkah untuk mengatur, mengendalikan dan

mengkoordinasikan para pihak yang terlibat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai institusi/lembaga yang diberikan mandat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertugas untuk melaksanakan/memfasilitasi kegiatan manajemen dan koordinasi para pihak tersebut mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sampai pada tingkat kelurahan.

3. Sasaran

- a. Terselenggaranya koordinasi tanggap darurat bencana banjir dengan melibatkan seluruh pihak;
- b. Terlaksananya pengerahan sumberdaya secara terkoordinir dari semua pihak untuk mendukung kegiatan tanggap darurat banjir;
- c. Terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk terkena dampak banjir sesuai standar pemberian bantuan.

4. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan sektor Posko untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Melaksanakan kegiatan koordinasi untuk penyiapan sumberdaya dengan melibatkan semua pelaku bidang Posko	BPBD Kab. Karawang dan semua pihak terkait	Jika terjadi tanda tanda terjadi bencana
2	Melakukan evaluasi, analisis data potensi banjir berdasarkan; 1) wilayah rawan bencana, 2) kenaikan permukaan air laut 3) curah hujan maksimum serta 4) faktor lainya yang dianggap dominan	BMKG, BPBD, dan BAPPEDA	H- 6 Pra Tanggap Darurat
3	Sebarluaskan informasi (berbagai media)	Dishub Kominfo, Humas, RAPI	Masa Tanggap Darurat
4	Menghimpun rencana masing – masing lembaga / instansi	Sekretariat Daerah dan BPBD	Masa Tanggap Darurat
5	Mengaktifkan Posko Tanggap Darurat BPBD dan mendirikan Posko dan tempat pengungsian jika dibutuhkan,	BPBD Kabupaten Karawang Dinas Sosial Kabupaten Karawang	Masa Tanggap Darurat

6	Buat call center	Relkom dan Dishub Kominfo	Masa Tanggap Darurat
7	Menginventaris data korban dan wilayah terdampak	BPBD, PMI, Tim SAR	Masa Tanggap Darurat
8	Melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan	BPBD	Masa Tanggap Darurat
9	Membuat laporan & Evaluasi harian & incidentil penanganan bencana .	Disesuaikan dengan Tim Pelaksana PB	Masa Tanggap Darurat
10	Rakor Evaluasi Akhir Penanggulangan Bencana Banjir .	Disesuaikan dengan Tim Pelaksana PB	6 hari Pasca Masa Tanggap Darurat

5. Proyeksi Kebutuhan

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kesejangan	Satuan
1	Personal				
	- Administrasi Keuangan	2	1	1	Orang
	- Data Base	2	1	1	Orang
	- Infokom	2	1	1	Orang
	- Logistik	10	4	6	Orang
2	Pendirian Posko Tanggap Darurat Bencana				
	- Lapangan Lokasi Bencana	6	6	0	Pos
	- Meja lapangan	6	2	4	Unit
	- Kursi	6	6	0	Unit
	- Velbet	6	6	0	Unit
	- Papan Data	6	1	5	Unit
	- Dispenser	6	1	5	Unit
3	Menghimpun perencanaan masing-masing bidang analisa, evakuasi, penetapan rencana, distribusi perencanaan				
	- Laptop	2	1	1	Unit
	- Printer	2	1	1	Unit
	- Genset	1	1	0	Unit
	- Kertas	6	6	0	Rim
	- Pulpen	6	6	0	Lusin
	- Buku Laporan	6	6	0	Buah
	- Pendukung ATK	6	6	0	Paket
4	Mengumpulkan data informasi				
	- Camera	6	1	5	Pos
	- Handycam	6	0	6	Pos
	- Flasdisk	6	6	0	Pos
	- Instalasi Pengiriman Data	6	0	6	Pos

	- HT	6	6	0	Pos
	- Handphone	6	6	0	Pos
5	Pam Swakarsa				
	- Senter	24	0	24	Pcs
	- Perahu Karet	10	11	(1)	Unit
	- Perlampung	48	20	28	Pcs
	- Megaphon	6	1	5	Unit
	- Mantel	40	40	0	Pcs
	- P 3 K	6	0	6	Pcs
	- BBM Perahu Karet	20	20	0	Liter
	- BBM Genset	20	20	0	Liter
	- Tenda Peleton	6	6	0	Unit

B. Sektor Perencanaan

Dalam menghadapi bencana banjir, perlu disiapkan “Rencana Operasi” dengan mengadaptasi/penyesuaian Rencana Kontijensi dengan kejadian sebenarnya setelah dilakukan kajian cepat dampak bencana. Sektor perencanaan bertugas untuk mengkoordinir proses penyesuaian Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi.

1. Pelibat Sektor

No	Lembaga	Nama Kontak	Kontak	Peran
1	Sekretariat	Sekretaris Daerah	08111998277	Mempersiapkan penunjukan insiden komando dan Mempersiapkan surat pernyataan tanggap darurat bencana banjir oleh Bupati Karawang
2	BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	082127112009	Merencanakan dan mengkoordinasikan tindak lanjut penganggaran kondisi tanggap darurat
3	Bappeda	Kepala Bappeda	085813551115	Mengkoordinir penyusunan biaya perencanaan operasi dan tanggap darurat
4	BMKG	Kepala BMKG	08121416323	Laporan perkembangan prakiraan cuaca dan potensi bencana banjir setiap hari
5	Dinas Sosial	Kepala Dinsos	08577713911	Mempersiapkan penyediaan bahan makanan (dapur umum) dan Mempersiapkan fasilitas sarana tempat pengungsian
6	Dinas Kesehatan	Kepala Dinkes		Mempersiapkan penyediaan petugas kesehatan, alkes dan obat-obatan

7	Dinas Cipta Karya	Kepala DCK		Mempersiapkan sarana sanitasi (MCK) dan perbaikan drainase
8	Dishub Kominfo	Kepala Dishubkominfo	085714555886	Mendukung jaminan kelancaran aksesibilitas dari dan menuju lokasi bencana banjir dan Mendukung kelancaran informasi dan kehumasan dan menyediakan analisis dan update informasi
9	Disdikpora	Kepala Disdikpora		Mempersiapkan penanganan dan solusi masalah gangguan kegiatan proses belajar mengajar
10	PLN	Kepala PLN		Mendukung /Mempersiapkan fasilitas penerangan listrik
11	PDAM	Kepala PDAM	08158267094	Mempersiapkan penyediaan air bersih/air minum
12	Puskesmas	Kepala UPTD Puskesmas		Mempersiapkan penyediaan petugas kesehatan, alkes dan obat-obatan
13	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Kepala DBMP		Mempersiapkan penanganan dan solusi masalah gangguan sarana prasarana jalan di lokasi bencana
14	PJT II	Kepala PJT II		Melaporkan potensi bencana banjir, hasil laporan peningkatan debit air, perkiraan luasan dampak

2. Situasi

Kejadian dan dampak bencana banjir mungkin tidak persis sama antara skenario kejadian dan skenario dampak yang dibuat dalam Rencana Kontijensi, sehingga jumlah kebutuhan-kebutuhan akan berbeda dengan yang direncanakan dalam Rencana Kontijensi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar pengerahan sumberdaya dapat dilakukan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan. Rencana Kontijensi yang telah disesuaikan/berubah menjadi Rencana Operasi sebagai dasar para pihak melaksanakan tanggap darurat banjir.

3. Sasaran

- a. Tersedianya Rencana Operasi sebagai landasan operasional pelaksanaan tanggap darurat banjir;
- b. Menyediakan analisis dan update informasi;
- c. Menyediakan bahan evaluasi kegiatan Operasi Tanggap Darurat secara berkala.

4. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Mengkoordinasikan pengumpulan data asessment kebutuhan (hasil kaji cepat)	BPBD, DCK, Dinsos, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Dinkes, dan Disdikpora	Masa Tanggap Darurat
2	Mengkoordinasikan penyesuaian rencana sektoral sesuai hasil kajian Cepat	Sekretaris Daerah BPBD Karawang	Masa Tanggap Darurat
3	Mengumpulkan, kompilasi dan sinkronisasi perencanaan semua sektor menjadi “Rencana Operasi Tanggap Darurat”	Sekretaris Daerah, BPBD Karawang	Masa Tanggap Darurat
4	Mensosialisasikan Rencana Operasi kepada semua sektor	Sekretaris Daerah, BPBD Karawang	Masa Tanggap Darurat
5	Memantau pelaksanaan Rencana Operasi	BPBD Karawang dan Bappeda Karawang	Masa Tanggap Darurat
6	Melakukan evaluasi kegiatan Operasi Tanggap Darurat dan menyediakan laporan hasil evaluasi	BPBD Karawang	Akhir Masa Tanggap Darurat

5. Proyeksi Kebutuhan

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kesejangan	Satuan
1	Perahu karet	16	16	0	
2	Pelampung	96	0	96	
3	Ring boy	16	0	16	
4	Webbing	16	0	16	
5	HT	16	0	16	
6	Megaphon	16	0	16	
7	Senter besar	16	0	16	
8	Tali tambang	16	0	16	
9	Tandu	16	0	16	
10	Kantong mayat	16	0	16	
11	Personil	64	40	24	
12	Mobil operasional	6	2	4	
13	MCK mobil	16	0	16	
14	Tandon air 2 m3	16	0	16	
15	Tenda pengungsi	20	5	15	
16	Tenda Posko	20	5	15	
17	Mobil tangki air	4	1	3	

C. Sektor Penanganan Logistik dan Peralatan

Mempersiapkan dan menyediakan logistik yang memadai bagi korban bencana (pengungsi baik pangan maupun sandang sesuai dengan kebutuhan)

1. Pelibat Sektor

No	Lembaga	Nama Kontak	Kontak	Peran
1	BPBD Karawang	BPBD Karawang	0267 8405677	Koordinator
2	Dinas Sosial	Kepala Dinsos	08577713911	Penyediaan logistik dan Pemberdayaan pengungsi
3	PDAM	Direktur PDAM	08158267094	Penyediaan air bersih
4	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan		Penanganan Drainase dan Infrastruktur terkait banjir
5	Satpol PP	Kasatpol PP		Keamanan
6	KODIM	Dandim	081288414400	Keamanan
7	Polres-Polsek	Kapolres Polsek		Keamanan

8	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas kesehatan		Penyediaan layanan kesehatan
9	PLN	Direktur PLN		Penanganan Listrik
10	Disdikpora	Kepala Disdikpora		Pendidikan
11	PMI	Ketua PMI		Dapur Umum
12	LSM dan Lembaga Sosial	Ketua LSM dan Lembaga Sosial		Kegiatan Pemberdayaan
13	Dunia Industri	Bank BJB		Kegiatan Pemberdayaan

2. Situasi

Masyarakat telah dievakuasi oleh tim evakuasi menuju tempat aman untuk pengungsian. Di lokasi pengungsian perlu dilakukan distribusi tempat tinggal, sehingga pengungsi tidak terkonsentrasi di satu lokasi. Masyarakat yang berada dilokasi pengungsian perlu mendapatkan fasilitas kebutuhan dasar seperati pelayanan pangan, sandang, kesehatan (fisik maupun psikis), air dan sanitasi serta pendidikan.

3. Sasaran

- Pengungsi mendapatkan tempat pengungsian yang layak;
- Pengungsi mendapatkan layanan pangan, sandang yang dibutuhkan dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan;
- Pengungsi mendapatkan layanan kesehatan baik fisik maupun psikis;
- Lokasi pengungsian tersedia air dan sanitasi;
- Tersedianya fasilitas bagi orang yang berkemampuan khusus;
- Tersedianya tempat pendidikan sementara.

4. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Menyediakan tempat penampungan pengungsian yang layak	Dinsos, BPBD	Masa Tanggap Darurat
2	Menyediakan air bersih	PDAM	Masa Tanggap Darurat
3	Menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai (kamar mandi, WC, pengolahan limbah padat/cair)	Dinas Cipta Karya	Masa Tanggap Darurat
4	Menyediakan layanan kesehatan (fisik dan psikis)	Dinas Kesehatan	Masa Tanggap Darurat
5	Kesehatan (fisik dan psikis) Dinkes 30 menit 5 Menyediakan tempat ibadah	Dinas Kesehatan	Masa Tanggap Darurat
6	Menyediakan pangan bagi pengungsi dan petugas/relawan	Dinas Sosial, BPBD	Masa Tanggap Darurat
7	Menyediakan alat-alat kebersihan pribadi (sabun, sikat gigi, dll)	Dinas Sosial, BPBD	Masa Tanggap Darurat
8	Menyediakan pakaian dan selimut layak pakai	Dinas Sosial, BPBD	Masa Tanggap Darurat
9	Menyediakan alat makan/minum dan bantuan non pangan lainnya	Dinas Sosial, BPBD	Masa Tanggap Darurat
10	Menyediakan kebutuhan khusus wanita dan bayi/balita	Dinas Sosial, BPBD	Masa Tanggap Darurat
11	Menyediakan perlengkapan dapur umum	Dinas Sosial, BPBD	Masa Tanggap Darurat
12	Menyediakan “bilik cinta”	Dinas Sosial	Masa Tanggap Darurat
13	Menyediaan fasilitas pendukung bagi “diffable”	Dinas Sosial	Masa Tanggap Darurat
14	Menyediakan hiburan	Dishub Kominfo	Masa Tanggap Darurat
15	Menyelenggarakan kegiatan produktif bagi pengungsi	Dinas Koperasi dan UMKM	Masa Tanggap Darurat
16	Menyediakan sarana pendidikan anak	Disdikpora	Masa Tanggap Darurat

17	Menyusun aturan main/etika di pengungsian	Kesbang	Masa Tanggap Darurat
18	Mengorganisir pemberdayaan pengungsi (dalam mengelola penampungan pengungsi)	Dinas Sosial	Masa Tanggap Darurat
19	Melaksanakan kegiatan assesment kebutuhan logistik	Dinas Sosial, BPBD	Masa Tanggap Darurat

5. Proyeksi Kebutuhan

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kesejangan	Satuan
1	Personel	400	40	360	Orang
2	Sarana Prasarana				
	Tenda Posko (Posko Bantuan)	16	0	16	Unit
	Tenda pengungsi (TP)	16	0	16	Unit
	Tenda Keluarga	32	0	32	Unit
	Tikar	10.000	0	10.000	Pcs
	Terpal	10.000	0	10.000	Pcs
	Velbed	100	0	100	Unit
	MCK	16	0	16	Unit
	Pompa air	16	0	16	Unit
	Selang air	100	0	100	Meter
	Tandon air	16	0	16	Pcs
	Ember air	100	0	100	Pcs
	Jerigen 20 liter	16	0	16	Pcs
	Gayung mandi	16	0	16	Pcs
	Tempat sampah	16	0	16	Pcs
	Tali plastik	100	0	100	Meter
	Tali tambang	100	0	100	Meter
	Parang	32	0	32	Pcs
	Cangkul	32	0	32	Pcs
	Sekop	32	0	32	Pcs
	Senter besar	16	0	16	Pcs
	Water Treatmen	1	1	0	Pcs
	Jas hujan	80	0	80	Pcs
	Sepatu boat	40	0	40	Pcs
	Tempat tidur lapangan	32	0	32	Pcs
	Megaphone	16	1	15	Pcs
	Handy Talky	40	0	40	Pcs
	Lampu darurat	16	0	16	Pcs
	Genset	16	0	16	Unit
	Mobil Tangki Air	1	0	0	Unit
	Truk	1	0	1	Unit

	Mobil operasional	4	3	1	Unit
	Kendaraan Roda Dua	2	2	0	Unit
	Obat obatan	200	0	200	Set
	Paket dapur Umum	16	2	14	Paket
3	Pangan				
	Beras	200	150	50	Ton
	Mie	2.500		2.500	Dus
	Telur	20.000		20.000	Pak
	Air minum kemasan	2.500		2.500	Dus
	Air bersih	100.000		100.000	Liter
	Makanan Tambahan Gizi	1000		1000	Paket
	Susu Ibu Hamil	100		100	Dus
	Gula	100		100	Kg
	Kopi	50		50	Dus
	Teh	50		50	Dus
	Kantong plastik	10		10	Pak
	Tempat makan steropom	2.500		2.500	Pak
	Sendok plastik	100		100	Lusin
	Gelas plastik	100		100	Lusin
4	Non Pangan				
	Sabun bayi Minyak Telon Minyak Kayu Putih Baby Oil Bedak Bayi	500		500	Paket
	Selimut bayi	500		250	Pcs
	Sabun mandi	250		250	Pcs
	Sikat gigi	250		250	Pcs
	Pasta gigi	250		250	Pcs
	Sabun cuci	250		250	Pcs
	Shampo	250		250	Pcs
	Pembalut Perempuan	50		50	Dus
	Pembalut bayi	50		50	Dus
	Sarung	1.000		1.000	Potong
	Tali jemuran	200		200	Meter
	Selimut dewasa	500		500	Lembar
	Pakaian	500		500	Pcs
	Lauk pauk	500		500	Paket

D. Sektor SAR dan Keamanan

Sektor SAR dan Keamanan bertugas untuk memastikan bahwa penduduk di kawasan yang rawan banjir mendapatkan perlindungan baik dari ancaman bencana banjir maupun dari ancaman keamanan wilayah pada saat terjadi situasi darurat. Pada saat terjadi bencana, sektor ini bertugas untuk memfasilitasi penduduk di wilayah rawan banjir untuk mengungsi ke tempat yang aman. Bersama-sama dengan penduduk setempat serta tim siaga desa/kelurahan (jika ada), sektor ini melakukan tugas untuk menjaga keamanan lingkungan. Pada saat terjadi banjir, sektor ini bertugas melakukan penanganan pertama jika muncul korban, baik yang mengalami cedera maupun korban meninggal dan melakukan koordinasi dengan Sektor Kesehatan untuk penanganan lanjutan bagi penduduk yang mengalami cedera serius. Jika muncul laporan kehilangan dari anggota masyarakat yang ditengarai menjadi korban banjir, sektor ini bertugas untuk melakukan pencarian dan evakuasi.

1. Pelibat Sektor

No	Lembaga	Nama Kontak	Kontak	Peran
1	BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	0821 2711 2009	Mengkoordinasikan semua pihak yang ada di Sektor SAR
2	KODIM	Dandim 0604	081288414400	Operasi SAR dan pengamanan
3	Polri - Polsek	Polres Polsek Krw Kota Polsek Klari Polsek Tlj Barat Polsek Tjl Timur Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Kawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya	0267 402240 0267 402516 0267 431032 - 0267 642222 0267 4675445 0264 316110 0264 8386699 0264 360110 0264 340988 0267 510110 0207 7002110 026 7482110 0267 7006579 0267 470220 0267 7002024 0267 4639044 0267 7004504 0267861 6946 0267 8617856 0267 5165251	Jaminan keamanan dan bantuan Operasi SAR
4	PMI	Ketua PMI		Bantuan Darurat dan Medis
5	Dinas Cipta	Kepala Dinas CK		Operasi SAR

	Karya			
6	Dinas Sosial	Kepala Dinsos	08577713911	Melaksanakan siaga dan operasi SAR
7	Scout Rescue	Ketua SR	08567952885	Melaksanakan siaga dan operasi SAR
8	RAPI	Ketua RAPI Karawang	081380299002	Komunikasi dan Operasi SAR
9	SAR Zhadhoel	Pimpinan SZ	081311192691	Melaksanakan siaga dan operasi sar
10	SAR Lodaya	Pimpinan SAR Lodaya	085888506989	Melaksanakan siaga dan operasi SAR
11	SAR Burial	Ketua SB	085776265743	Melaksanakan siaga dan operasi SAR
12	SAR SAGARA	Pimpian SAR SAGARA	08562433234	Melaksanakan siaga dan operasi SAR

2. Situasi

Pada saat bencana banjir, sektor ini melakukan koordinasi dengan tim siaga kelurahan untuk melakukan langkah-langkah preventif dengan menghimbau penduduk yang rumahnya berada di kawasan rawan banjir untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal ini untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dan harta benda penduduk dari ancaman banjir. Jika ada laporan bahwa banjir telah terjadi, sektor ini bersama dengan sektor kesehatan dan pemulihan darurat segera menuju lokasi bencana banjir untuk melakukan penanganan.

3. Sasaran

- a. Terlaksananya operasi SAR secara terkoordinir untuk melakukan pertolongan bagi masyarakat korban bencana;
- b. Terevakuasinya masyarakat yang terkena dampak ke tempat aman yang telah disiapkan.

4. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Koordinasi/komunikasi : 1. Koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan operasi SAR 2. Identifikasi musibah	BPBD, KODIM, POLRES, PMI, Potensi SAR	14 hari
2	Penyiapan unsur sarana dan prasarana : 1. Pesonil 2. Brefing 3. Perencanaan OPS 4. Pembentukan unsur OPS SAR	BPBD, PMI, Potensi SAR, Unsur terkait	14 hari
3	Pelaksanaan OPS SAR 1. Pembagian SRU ke titik lokasi musibah 2. Koordinasi posko yang ada di lokasi musibah/bencana 3. Pencariaan, pertolongan, penyelamata ke posko yang telah ada/disediakan baik korban selamat, memerlukan perawatan medis atau meninggal	BPBD, PMI, KODIM, POLRI, Potensi SAR, Masyarakat	14 hari
4	Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan OPS SAR	BPBD. Tim SAR	14 hari

5. Proyeksi Kebutuhan

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kesejangan	Satuan
	Personal	12	12	0	Orang
	Perahu Karet/LCR	3	0	3	Unit
	Pelampung	12	0	12	Pcs
	Dayung	12	0	12	Pcs
	Ring boy	6	0	6	Pcs
	Webbing	6	0	6	Pcs
	Handy Talky	3	0	3	Unit
	Megaphone	3	0	3	Unit
	Senter Besar	3	0	3	Unit
	Tali tambang	150	0	150	Meter
	Tandu	3	0	3	Pcs
	Kantong mayat	10	0	10	Pcs
	Mobil operasional	1	0	1	Unit
	MCK Mobil	1	0	1	Unit
	Tandon air	1	0	1	Pcs
	Tenda Pengungsi	3	0	3	Unit
	Tenda Posko	3	0	3	Unit
	BBM	35	0	35	Liter
	Oli	15	0	15	Liter
	Mesin tempel	3	0	3	Unit

E. Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan baik pada saat terjadi banjir maupun pada saat berlangsungnya situasi darurat sampai situasi darurat berakhir kepada penduduk yang terpapar dan terdampak banjir.

1. Pelibat Sektor

No	Lembaga	Nama Kontak	Kontak	Peran
	BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	0821 2711 2009	Mengkoordinasi OPD dan Relawan untuk Mobilisasi dan Mengkerahkan pada saat tanggap darurat.
	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan		Sektor kesehatan bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesehatan baik pada saat terjadi bencana maupun pada saat berlangsung nya situasi darurat sampai situasi darurat berakhir kepada penduduk yang terpapar dan terdampak bencana
	Kesdim 0604	Kesdim 0604/Karawang		Menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam penanganan pasien rujukan akibat bencana banjir.
	RSUD	Direktur RSUD		Menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam penanganan pasien rujukan akibat bencana banjir.

	Puskesmas	Ka UPTD Puskesmas		1. Memberikan Pertolongan Pertama pada korban bencana dibidang kesehatan. 2. Mengarahkan personel, peralatan danperlengkapan medis, obatobatan dan sarana trans-portasi yang dimiliki. 3. Melakukan per- tolongan pertama dan mengarahkan tindak lanjut perawatan dalam hal pertolongan medis.
	PMI	Ketuaa PMI		Memberikan per- tolongan pertama pada korban bencana dibidang kesehatan

2. Situasi

Banjir dapat menyebabkan sejumlah penduduk menderita cidera/luka, terpapar penyakit, bahkan mungkin akan menimbulkan korban jiwa dan sebagian besar penduduk harus mengungsi ke tempat yang aman. Kondisi pengungsian yang minim sarana dan prasarana menyebabkan ancaman menurunnya kualitas kesehatan bagi para penduduk yang mengungsi.

3. Sasaran

- a. Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi para penduduk korban banjir baik yang terpapar dan terdampak;
- b. Terlaksananya tindak lanjut rujukan pelayanan kesehatan yang optimal bagi korban banjir.

4. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Pertemuan koordinasi sektor kesehatan	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, Kesdim, Puskesmas, PMI	Masa Tanggap Darurat
2	Penyusunan rencana petugas yang akan ditempatkan pada saat menjelang musim hujan (pembangunan posko kesiapsiagaan pada lokasi rencana evakuasi sesuai skenario).	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, Kesdim, Puskesmas, PMI	Masa Tanggap Darurat
3	Inventarisasi dan penyiapan sumber daya yang tersedia.	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, Kesdim, Puskesmas, PMI	Masa Tanggap Darurat
4	Penyiapan Tim Reaksi Cepat (TRC) Medis dan Tim Kajian Cepat Kesehatan	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, PMI	Masa Tanggap Darurat
5	Memberikan Pertolongan Pertama pada korban bencana	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, PMI	Masa Tanggap Darurat
6	Penyiapan puskesmas dan rumah sakit rujukan pelayanan 24 jam	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, Kesdim, Puskesmas.	Masa Tanggap Darurat
7	Pengeralahan sumber daya	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, Kesdim, Puskesmas, PMI	Masa Tanggap Darurat
8	Penyusunan laporan kegiatan tanggap darurat	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, Kesdim, Puskesmas, PMI	Masa Akhir Tanggap Darurat

5. Proyeksi Kebutuhan

N o	Uraian	Kebutuh an	Tersed ia	Kesejang an	Satua n
1	Tenaga Teknis				
	1. Dokter Spesialis	1	119	(118)	Orang
	2. Dokter Umum	2	84	(82)	Orang
	3. Perawat	10	519	(509)	Orang
	4. Bidan	5	93	(88)	Orang
	5. Epidemiolog	2	0	2	Orang
	6. Sanitarian	2	0	2	Orang
	7. Petugas Gizi	4	0	4	Orang
	8. Apoteker	2	17	(15)	Orang
	9. Asisten Apoteker	2	83	(81)	Orang
	10. Supir Ambulan	5	40	(35)	Orang
	11. Tenaga Administrasi	4	19	(15)	orang
2	Prasarana				
	1. Mobil Ambulan	2	0	2	Unit
	2. Kendaraan Roda Dua	4	0	4	Unit
	3. Rumah Sakit Rujukan	5	0	5	Unit
	4. Puskesmas	5	0	5	Unit
	5. Papan Data	1	0	1	Unit
	6. Laptop	2	0	2	Unit
	7. Printer	2	0	2	Unit
	8. Lampu Penerangan	10	0	10	Unit
	9. Genset	4	0	4	Unit
	10. ATK	10	0	10	Paket
3	Sarana				
	1. Perawatan luka	4	0	4	Pcs
	2. Lampu Penerangan	4	0	4	Pcs
	3. Diagnostic Set	4	0	4	Pcs
	4. Partus Set	4	0	4	Pcs
	5. Perawatan luka	4	0	4	Pcs
	6. Timbangan	4	0	4	Pcs
	7. Bed periksa	4	0	4	Pcs
	8. Lampu periksa	4	0	4	Pcs
	9. Baskom cuci tangan	4	0	4	Pcs
	10. Tandu	4	0	4	Pcs
	11. Tempat tidur pasien	4	0	4	Pcs
	12. Sarung tangan	4	0	4	Pcs
	13. Kantong mayat	10	0	10	Pcs
	14. Kantong darah	30	0	30	Pcs
	15. Sanitarian kit	30	0	30	Pcs
	16. Tabung oksigen besar	30	0	30	Pcs
	17. Tabung oksigen kecil	4	0	4	Pcs
	18. Obat-obatan	4	0	4	Pcs
		10	0	10	Paket

F. Sektor Sarana dan Prasarana

Kejadian banjir seringkali menyebabkan infrastruktur rusak atau tidak berfungsi. Padahal dalam situasi darurat, fungsi-fungsi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, penerangan, pasokan air bersih dan sebagainya sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan tanggap darurat.

1. Pelibat Sektor

No	Lembaga	Nama Kontak	Kontak	Peran
	BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	0821 2711 2009	Mengkoordinasi OPD pada saat tanggap Ddarurat
	Dinas Cipta Karya	Kepala Dinas Cipta Karya		Memastikan fungsi fungsi infrastruktur bangunan gedung pemerintahan berfungsi
	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan		Memastikan fungsi fungsi infrastruktur Perhubungan berfungsi
	Dishub Kominfo	Kepala Dinas Dishub Kominfo	085714555886	Memastikan jalur jalur transportasi alternatif berfungsi.
	Telkom Karawang	Direktur Telkom		Memastikan fungsi telekomunikasi berfungsi
	PLN	Direktur PLBN		Memastikan fungsi penerangan berfungsi
	KODIM	Dandim 0604	081288414400	Memberikan dukungan personel dan peralatan
	Polres-Polsek	Polres Karawang Polsek Krw Kota Polsek Klari Polsek Tlj Barat Polsek Tjl Timur Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya	0267 402240 0267 402516 0267 431032 - 0267 642222 0267 4675445 0264 316110 0264 8386699 0264 360110 0264 340988 0267 510110 0267 7002110 026 7482110 0267 7006579 0267 470220 0267 7002024 0267 4639044 0267 7004504 0267861 6946 0267 8617856 0267 5165251	Memberikan dukungan personel dan peralatan
	PDAM	Direktur PDAM	08158267094	Memastikan tersedia- nya pasokan air bersih bagi penduduk di lokasi pengungsian
	PJT II	Kepala PJT II		Memberikan informasi Tinggi Muka Air pada setiap pintu pemantau berfungsi

2. Situasi

Genangan baniir diperkirakan akan menggenangi sejumlah infrastruktur dan badan jalan-jalan utama sehingga mengganggu akses transportasi dan berfungsinya infrastruktur vital. Untuk itu dibutuhkan upaya segera dalam situasi darurat untuk memulihkan fungsi infrastruktur vital seperti pengaturan transportasi, listrik dan pasokan air bersih.

3. Sasaran

- a. Berfungsinya akses transportasi menuju ke wilayah yang terdampak;
- b. Berfungsinya penerangan di wilayah yang terdampak;
- c. Berfungsinya pasokan air bersih di wilayah yang terdampak;
- d. Tersedianya pasokan air bersih.

4. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Melakukan pertemuan koordinasi antar OPD.	BPBD	Masa Tanggap Darurat
2	Pendataan sumberdaya yang tersedia.	BPBD, Dinkes, Dinas CK, Dinas BMP, Dishub Kominfo, Telkom, PLN, PDAM, PJT II, KODIM, POLRES-POLSEK	Masa Tanggap Darurat
3	Penyusunan rencana tanggap darurat sektor pemulihan darurat.	BPBD, Dinas BMP, Dinas CK, Dishub Kominfo, PDAM, PLN, Telkom, Dinsos	Masa Tanggap Darurat
4	Mobilisasi menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan.	BPBD, KODIM, POLRES Dinas CK, Dinas BMP Dinsos	Masa Tanggap Darurat
5	Mengaktifkan posko lapangan	BPBD, KODIM, POLRES POLSEK	Masa Tanggap Darurat
6	Pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan	BPBD, KODIM, POLRES POLSEK Dinsos	Masa Tanggap Darurat
7	Menyusun laporan kegiatan tanggap darurat	BPBD, Dinkes, Dinas CK, Dinas BMP, Dishub Kominfo, Telkom, PLN, PDAM, PJT II, KODIM, POLRES-POLSEK	Akhir Masa tanggap Darurat

5. Proyeksi Kebutuhan

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kesejangan	Satuan
1	Personel				
	Operator	1	0	1	Orang
	Pembantu operator	2	0	2	Orang
	Sopir	2	0	2	Orang
	Pengawas lapangan	2	0	2	Orang
	Tenaga adm	2	0	2	Orang
	Petugas jaga	2	0	2	Orang
	Operator komunikasi	1	0	1	orang
2	Peralatan				
	Dump Truck	5	0	5	Unit
	Genset 13 KVA	5	0	5	Unit
	Pompa air	5	0	5	Unit
	Selang air	5	0	5	Set
	Chain Saw	5	0	5	Unit
	Gergaji	5	0	5	Pcs
	Sekop	5	0	5	Pcs
	Cangkul	5	0	5	Pcs
	Linggis	5	0	5	Pcs
	Parang	5	0	5	Pcs
	Palu / martil	5	0	5	Pcs
	Kereta sorong	5	0	5	Pcs
	Senter besar	5	0	5	Pcs
	Terpal	5	0	5	Lembar
	Jas hujan	5	0	5	Stel
	Sepatu boat	5	0	5	Pasang
	Helm proyek	5	0	5	Pcs
	BBM	50	0	50	Liter
	Handy talky	5	0	5	Unit
	Mobil operasional PU	1	0	1	Unit
	Mobil operasional PLN	1	0	1	Unit
	Mobil ops Telkom	1	0	1	Unit
	Mobil ops PDAM	1	0	1	Unit
	Peta lokasi	30	0	30	Lembar
	GPS	30	0	30	Unit
	Penunjuk Jalan	30	0	30	Unit
	Rambu Jalan	120	0	120	Unit

BAB VI

PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah proses penyusunan rencana kontinjensi dan dihimpun dalam suatu dokumen resmi, tahap selanjutnya adalah perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan/langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi kejadian bencana. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut menuntut peran aktif masing-masing sektor yang juga memerlukan koordinasi dan kerja sama yang baik.

A. Rencana Tindak Lanjut

1. Dokumen Rencana Kontinjensi ini disusun bersama oleh para pemangku kepentingan dari Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Kabupaten Karawang, pada situasi dan kondisi bulan Oktober 2016;
2. Dokumen Rencana Kontinjensi ini akan ditandatangani oleh setiap Pimpinan Instansi yang terlibat dan dikukuhkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Karawang;
3. Aktivasi dari Rencana Kontinjensi ini menjadi Rencana Operasional pada saat terjadi bencana yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Karawang;
4. Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian isi dokumen Rencana Kontinjensi;
5. Apabila hingga batas waktu yang direncanakan/diperkirakan tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontinjensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga tahun berikutnya;
6. Evaluasi atas isi dokumen Rencana Kontinjensi ini akan dilakukan setiap 5 tahun untuk penyesuaian isi dokumen Rencana Kontinjensi;
7. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Rencana Kontinjensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

B. Simulasi / Gladi

Untuk menguji ketepatan Rencana Kontinjensi yang dibuat, maka perlu dilakukan uji coba dalam bentuk simulasi atau gladi. Dalam gladi ini diusahakan supaya besaran dan skalanya mendekati peristiwa/kejadian yang si skenarioikan. Apabila tidak memungkinkan, maka dapat diambil sebagian dari luas yang sesungguhnya.

C. Pemutakhiran Data

1. Kegiatan-kegiatan dalam rangka rencana tindak lanjut ini disusun dalam tabel yang memuat tahapan-tahapan dan para pelaku/sektor-sektor serta waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Inventarisasi dan pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada di tiap daerah dilakukan secara berkala.
3. Pertemuan-pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi-asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumberdaya.
4. Menyusun prosedur-prosedur tetap yang sifatnya dapat mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana kontinjensi yang telah disusun.
5. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya.

D. Rencana Aksi

SIMULASI RENCANA KONTIJENSI BENCANA ALAM

KABUPATEN KARAWAN TAHUN 2016

(MODEL METODE TABLE TOP EXERCISE)

Kerangka Pikir

1. Situasi Siaga

- a. Memasuki musim penghujan di Kabupaten Karawang ada informasi *Early Warning System* (EWS) dari PJT II, BMKG, RAPI, Ormas dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan ke **Posko Siaga BPBD Kabupaten Karawang** yang berisi tentang peningkatan Tinggi Muka Air (TMA), tingginya intensitas curah hujan yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir;
- b. Menindaklanjuti informasi tersebut, maka BPBD Kabupaten Karawang membentuk **Pusdalops** dan meneruskan informasi yang dimaksudkan di atas ke wilayah yang rawan banjir melalui unsur **Muspika** dan masyarakat setempat agar siaga banjir di wilayah masing-masing (waktu bersamaan dengan diterimanya informasi EWS).
- c. Setelah Pusdalops BPBD Kabupaten Karawang menyebarkan/ meneruskan informasi tersebut, maka BPBD Kabupaten Karawang melaksanakan **Rapat Koordinasi** dengan **Pihak Terkait** untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana banjir tersebut (Waktu paling lambat sehari setelah **EWS** dan dilaksanakan selama 1 hari).
- d. Dari hasil rapat koordinasi itu, maka disusunlah sektor dengan tupoksi dan struktur organisasi masing-masing sektor sebagai serta penanggung jawab (Koordinator) sektornya untuk memudahkan koordinasi dalam rencana operasi penanganan banjir tersebut, serta oleh Kepala BPBD menunjuk **Komandan Operasi Siaga-Darurat** untuk memudahkan koordinasi antar sektor tersebut.

Adapun sektor yang disepakati dalam rapat koordinasi itu sesuai dengan kebutuhan untuk menangani banjir tersebut (sesuai finalisasi draft rencana kontijensi banjir Kabupaten Karawang tahun 2016) adalah sebagai berikut (waktu bersamaan dengan rapat koordinasi);

1) Sektor Posko (Pusat Penengendali Operasional)

Sektor Posko berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan tanggap darurat bagi sektor-sektor yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lapangan. Sektor ini dibawah komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Bupati Karawang sebagai pimpinan tertinggi.

Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : BPBD Kabupaten Karawang, Sekretariat Daerah, BMKG, PJT II, TNI, POLRES – POLSEK, Dishub Kominfo, Humas, Bankom, TELKOM, SATPOL PP, RAPI, Perwakilan Lembaga Terkait.

2) Sektor Perencanaan

Dalam menghadapi bencana banjir, perlu disiapkan **“Rencana Operasi”** dengan mengadaptasi / penyesuaian Rencana Kontijensi dengan kejadian sebenarnya setelah dilakukan kajian cepat dampak bencana. Sektor perencanaan bertugas untuk mengkoordinir proses penyesuaian Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi.

Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : Sekretariat Daerah, BPBD Kabupaten Karawang, Bappeda, BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas CK, Dishub Kominfo, Disdikpora, PLN, PDAM, Puskemas, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan PJT II.

3) Sektor Logistik

Sektor Logistik bertugas untuk mempersiapkan dan menyediakan logistik yang memadai bagi korban bencana (pengungsi baik pangan maupun sandang sesuai dengan kebutuhan)

Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : BPBD Kabupaten Karawang, Dinas Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Cipta Karya, PDAM, Dinas BMP, Satpol PP, TNI, Polres-Polsek, Dinas Kesehatan, PLN, Disdikpora, PMI, LSM/Lembaga Sosial, dan Dunia Industri.

4) Sektor SAR dan Keamanan

Sektor Keamanan dan SAR bertugas untuk memastikan bahwa penduduk di kawasan yang rawan banjir mendapatkan perlindungan baik dari ancaman bencana banjir maupun dari ancaman keamanan wilayah pada saat terjadi situasi darurat. Pada saat terjadi bencana, sektor ini bertugas untuk memfasilitasi penduduk di wilayah rawan banjir untuk mengungsi ke tempat yang aman. Pada saat terjadi banjir, sektor ini bertugas untuk melakukan penanganan pertama jika muncul korban baik yang mengalami cedera maupun korban meninggal dan melakukan koordinasi dengan Sektor kesehatan untuk penanganan lanjutan bagi penduduk yang mengalami cedera serius. Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : BPBD Kabupaten Karawang, PDAM, Dinas BMP, Satpol PP, TNI, Polres-Polsek, Dinas Kesehatan, PLN, Disdikpora, PMI, LSM/Lembaga Sosial, Tim SAR Lokal Karawang dan Dunia Industri.

5) Sektor Kesehatan

Sektor Kesehatan bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang terpapar dan terdampak banjir mulai pada saat terjadinya banjir (situasi darurat) sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat banjir.

Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi: BPBD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kesdim 0604/Karawang, Puskesmas, dan PMI.

6) Sektor sarana dan Prasarana

Sektor Prasarana dan Sarana bertugas untuk memulihkan kembali berfungsinya infrastruktur dasar yang rusak akibat terjadinya bencana banjir. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam situasi darurat, karena fungsi-fungsi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, penerangan, pasokan air bersih, dan sebagainya sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan tanggap darurat.

Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi: BPBD Kabupaten Karawang, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial, Telkom, PLN, TNI, Polres-Polsek, PDAM dan PJT II.

- e. Setelah semua sektor telah dibentuk, maka Sektor Perencanaan melaksanakan penyusunan metode rencana operasi dan analisa kebutuhan beserta jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi darurat bencana banjir sesuai dengan data survey dari daerah yang akan terpapar dan terdampak contoh jumlah korban, jumlah dan luas wilayah, jumlah kelompok rentang, jenis kelamin, dll.(waktu untuk kegiatan ini 1 hari).
- f. Selanjutnya oleh Komandan Operasi Siaga-Darurat melakukan koordinasi antar sektor mengenai ketersediaan sumber daya yang tersedia baik manusia maupun peralatan untuk dijadikan dasar dalam menghitung tingkat rasio kesenjangan antara sumber daya dan kebutuhan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan ril dalam melaksanakan operasi darurat bencana banjir yang dihadapi (waktu untuk kegiatan ini 1-2 hari).

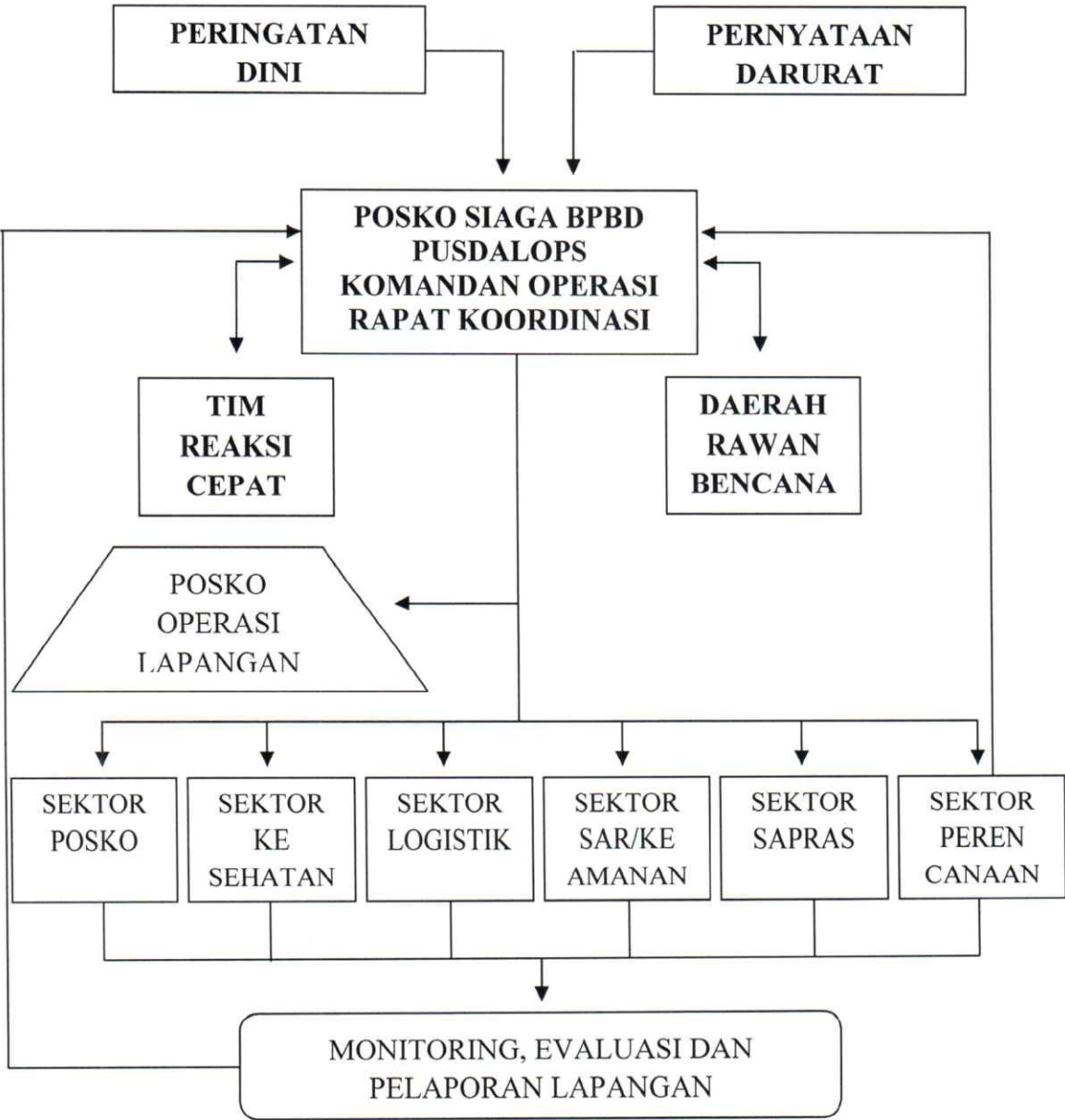
2. Situasi Darurat

- a. Pusdalops menerima laporan tindak lanjut dari EWS dari Muspika setempat bahwa telah terjadi banjir di beberapa wilayah yang terindikasi rawan banjir antara lain Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan beberapa kecamatan lainnya sesuai data dalam dokumen Rencana kontigensi, maka komandan siaga darurat melaporkan ke Bupati Karawang untuk meminta Permohonan Surat Pernyataan Darurat Bencana Bencana yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Karawang Tentang Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Karawang.
- b. Setelah mendapat surat pernyataan darurat bencana, maka Komandan Operasi Siaga-Darurat langsung memerintahkan Tim Kaji Cepat turun ke lokasi bencana banjir untuk melaksanakan pengecekan awal untuk mengetahui jumlah korban terpapar, terdampak, kerusakan rumah penduduk, kerusakan infrastruktur, korban luka, korban hilang/ meninggal dan kerugian lain yg diakibatkan banjir ini serta kebutuhan pertolongan awal yg dibutuhkan.
- c. Tim Kaji Cepat melaporkan atau kembali ke Pusdalops untuk menyampaikan hasil kajian cepat yang diperoleh dari lokasi banjir tersebut.
- d. Setelah menerima dan mengkaji laporan dari Tim Kaji Cepat, Komandan Operasi Siaga-Darurat melaksanakan koordianasi antar sektor dan segera mendirikan/membentuk Posko Operasi Lapangan serta memerintahkan semua sektor untuk segera melaksanakan tindak lanjut aksi penanganan korban banjir tersebut sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti melakukan evakuasi tanggung jawab oleh sektor apa, penyediaan tempat pengungsian oleh sektor apa, logistik oleh sektor apa, pertolongan korban yang sakit dan luka oleh sektor apa, dan hal lain yang dibutuhkan pada saat darurat.

- e. Semua hasil kegiatan beserta biayanya selama masa darurat yang dilaksanakan oleh sektor masing-masing, harus dibuatkan Laporan untuk disampaikan ke Komandan Operasi Siaga-Darurat untuk dijadikan bahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan operasi Siaga-Darurat berlangsung.
- f. Setelah Masa Darurat bencana banjir akan berakhir, maka komandan Operasi Siaga-Darurat melakukan rapat evaluasi bersama semua sektor yang terkait untuk mengetahui semua masalah baik yang mendukung maupun yang menghambat jalannya Operasi Siaga-Darurat yang telah dilaksanakan. Hal ini merupakan koreksi untuk penanganan Darurat Bencana Banjir ke depan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien.
- g. Selanjutnya apabila **Masa Tanggap Darurat Banjir** dinyatakan berakhir oleh Bupati Karawang yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis dan tidak diperpanjang, maka Komandan Operasi Siaga-Darurat rapat bersama semua sektor terkait dan sekaligus menyatakan operasi tanggap darurat telah ditutup atau diberhentikan.
- h. Menindaklanjuti berakhirnya operasi siaga-darurat ini, maka Komandan Operasi Siaga Darurat bersama semua sektor terkait menyusun laporan final pertanggungjawaban hasil dari selama operasi siaga-darurat ini berlangsung untuk diserahkan ke Bupati Karawang selaku penanggungjawab melalui Kepala Pelaksana BPBD secara keseluruhan dari penanganan bencana di Kabupaten Karawang, dimana laporan tersebut harus diserahkan paling lambat 3 hari setelah masa darurat berakhir.
- i. Laporan ini harus dipublikasikan pertanggungjawabannya sebagai wujud transparansi dalam penanganan bencana kepada masyarakat secara umum.

Demikian skenario proses dan alur singkat simulasi *Table Top Exercise* (TTX) atau metode gladi ruang Rencana Kontigensi Bencana di Kabupaten Karawang dan apabila ada kekurangan, maka kami mengharapkan masukan dari semua pihak terkait untuk menjadi bahan perbaikan agar ke depan dapat lebih baik sesuai yang kita harapkan bersama.

BAGAN ALUR SIMULASI TABLE TOP EXERCISE (TTX) RENCANA KONTIJENSI BENCANA KABUPATEN KARAWANG



LEMBAR PERNYATAAN

Kami Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga / Unit Kerja di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam di Kabupaten Karawang, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini :

No	Sektor	Kordinator	Pelaksana	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Posko	Kepala Pelaksana BPBD	1. BPBD 2. TNI 3. POLRES 4. BMKG 5. PJT II 6. Dishub Kominfo 7. Bagian Humas 8. Telkom 9. Satpol PP 10. RAPI	1. Melakukan evaluasi, analisis data potensi banjir berdasarkan : a. Wilayah rawan bencana; b. Kenaikan Tinggi Muka Air (TMA); c. Curah hujan maksimum ; d. Faktor lainnya yang dianggap dominan 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi untuk penyiapan sumberdaya dengan melibatkan semua pelaku bidang Posko 3. Menyebarkan informasi (berbagai media); 4. Menghimpun rencana masing-masing OPD/lembaga / instansi/unit kerja; 5. Mengaktifkan Posko Tanggap Darurat BPBD dan mendirikan Posko dan tempat pengungsian jika dibutuhkan; 6. Mendirikan call center; 7. Menginventaris data korban dan wilayah terdampak 8. Melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan.	14 hari

2	Sektor Perencanaan	Kepala Bappeda	1. Bappeda 2. BPBD 3. BMKG 4. PJT II 5. Dinas Sosial 6. Dinas Kesehatan 7. Dishub Kominfo 8. Dinas Cipta Karya 9. Disdikpora 10. PLN 11. PDAM 12. Puskemas 13. Dina Bina Marga dan Pengairan 14. PJT II	1. Mengkoordinasikan pengumpulan data asesment kebutuhan (hasil kajian cepat); 2. Mengkoordinasikan penyesuaian rencana sektoral sesuai hasil kajian cepat; 3. Mengumpulkan, kompilasi dan sinkronisasi perencanaan semua sektor menjadi "Rencana Operasi Tanggap Darurat"; 4. Mensosialisasikan Rencana Operasi kepada semua sektor; 5. Memantau pelaksanaan Rencana Operasi; 6. Melakukan evaluasi kegiatan Operasi Tanggap Darurat dan menyediakan laporan hasil evaluasi.	14 hari
3	Sektor Logistik dan Peralatan	Kepala Pelaksana BPBD	1. BPBD 2. Dinas Sosial 3. PDAM 4. Dinas Bina Marga dan Pengairan 5. Satpol PP 6. TNI 7. POLRES 8. Dinas Kesehatan	1. Menyediakan pangan bagi pengungsi dan petugas/relawan; 2. Menyediakan alat-alat kebersihan pribadi (sabun, sikat gigi, dll); 3. Menyediakan pakaian dan selimut layak pakai; 4. Menyediakan alat makan/minum dan bantuan non pangan lainnya; 5. Menyediakan kebutuhan khusus wanita dan bayi/balita; 6. Menyediakan perlengkapan dapur umum;	14 hari

			9. PLN 10. Disdikpora 11. PMI 12. LSM/Lembaga Sosial 13. Dunia Industri	7. Menyediaan fasilitas pendukung bagi “diffable”; 8. Menyediakan hiburan; 9. Menyelenggarakan kegiatan produktif; bagi pengungsi; 10. Menyediakan sarana pendidikan anak; 11. Menyusun aturan main/etika di pengungsian; 12. Mengorganisir pemberdayaan pengungsi (dalam mengelola penampungan pengungsi); 13. Melaksanakan kegiatan assesment kebutuhan logistik.	
4	SAR dan Keamanan	Dandim 0604	1. KODIM 0604/KARAWANG 2. BPBD 3. PMI 4. Dinas Cipta Karya 5. Dinas Sosial 6. Scout Rescue 7. RAPI 8. SAR Zhadhoel 9. SAR Lodaya 10. SAR Burial 11. SAR Sagara	1. Koordinasi/komunikasi dengan : a. Pihak terkait pelaksanaan operasi SAR; b. Identifikasi kejadian musibah / korban. 2. Penyiapan unsur sarana dan prasarana antara lain : a. Pesonil; b. Brefing; c. Perencanaan OPS; d. Pembentukan unsur OPS SAR 3. Pelaksanaan Operasi SAR meliputi : a. Pembagian SRU ke titik lokasi musibah; b. Koordinasi posko yang ada di lokasi musibah/bencana; c. Pencarian, pertolongan, penyelamatan ke posko yang telah ada/disediakan baik korban selamat, memerlukan perawatan medis atau meninggal. 4. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Operasi SAR	14 hari

5	Sektor Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. KESDIM 0604 4. RSUD Karawang 5. Puskesmas 6. PMI	1. Koordinasi/komunikasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan operasi SA; 2. Identifikasi musibah/korban bencana; 3. Penyiapan unsur sarana dan prasarana; 4. Pesonil/ SPU; 5. Brefing; 6. Perencanaan Operasi; 7. Pembentukan unsur Operasi SAR; 8. Pelaksanaan Operasi SAR; 9. Pembagian SRU ke titik lokasi musibah; 10. Koordinasi posko yang ada di lokasi musibah/bencana; 11. Pencariaan, pertolongan, penyelamatan ke posko yang telah ada/disediakan baik korban selamat, memerlukan perawatan medis atau meninggal; 12. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Operasi SAR	14 hari
---	------------------	------------------------	---	--	---------

6	Sektor Sarana dan Prasarana	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan	1. Dinas Mina Marga dan Pengairan 2. BPBD 3. Dinas Cipta Karya 4. Dishub Kominfo 5. Telkom 6. PLN 7. KODIM 0604 8. POLRES 9. PDAM 10. PJT II	1. Melakukan pertemuan koordinasi antar pihak; 2. Pendataan sumberdaya yang tersedia; 3. Penyusunan rencana tanggap darurat sektor pemulihan darurat; 4. Mobilisasi Menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan; 5. Pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan; 6. Menyusun laporan kegiatan tanggap darurat.	14 hari
---	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---------

BAB VII

P E N U T U P

Demikian dokumen rencana kontijensi ini dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua pelaku penanggulangan bencana alam (banjir, abrasi, dan tanah longsor) di Kabupaten Karawang dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara efektif, efisien dan terpadu.

Proyeksi kebutuhan yang masih belum bisa tersedia kiranya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, Instansi Vertikal, Lembaga Swasta, Masyarakat, relawan dan lain-lain.

Kami menyadari bahwa rencana kontijensi ini, masih perlu penyempurnaan dan peninjauan secara berkala untuk pemutahiran data yang ada.


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA